



RENSTRA DISKOMINFO 2025-2029



Powered by :

www.diskominfo.lomboktengahkab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta indikator kinerja — baik indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program dan kegiatan. Dokumen ini disusun sebagai rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

Melalui dokumen ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran, tenaga, maupun data dan informasi, sehingga dokumen ini dapat tersusun dengan baik.

Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Lombok Tengah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

LOMBOK TENGAH

Praya, Oktober 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. MUHAMAD

NIP. 196512311989031209

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Dasar Hukum Penyusunan..... | 2 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 4. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... | 10 |
| a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah..... | 10 |
| b. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah..... | 23 |
| c. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah..... | 30 |
| d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah..... | 38 |
| e. Mitra Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah..... | 40 |
| 2. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah | 43 |
| a. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah..... | 43 |
| b. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah..... | 46 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 54 |

| | |
|--|------------|
| 1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah | 56 |
| 2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah | 58 |
| 3. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah | 64 |
| 4. Tahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah | 67 |
| 5. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah | 69 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 73 |
| 1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah..... | 73 |
| a. Program | 74 |
| b. Kegiatan..... | 95 |
| c. Sub Kegiatan | 96 |
| d. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... | 132 |
| 2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | 139 |
| 3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 145 |
| BAB V P E N U T U P..... | 154 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah Tahun 2025
- Tabel 2.2 Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan Ruang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah Tahun 2025
- Tabel 2.3 Pendidikan dan Jenis Kelamin Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025
- Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana (Data Aset) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Triwulan II (Januari s/d Juni) Tahun 2025
- Tabel 2.5 Program, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020-2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 2.6 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Realisasi Tahun 2021-2024 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD
- Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

- Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
- Tabel 4.7 Metode Pengukuran atau Formulasi Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai bentuk implementasi kebijakan pembangunan daerah. Secara umum, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman arah pengembangan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, serta memuat langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Demikian pula, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman perencanaan jangka menengah bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

Penyusunan dokumen ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat sebagai penerima informasi dan pemerintah sebagai penyedia informasi. Peran strategis ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu: **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (MASMIRAH).”**

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 - m. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- o. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- r. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
- v. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
- w. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;

- x. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
- y. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital;
- z. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
- aa. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 adalah untuk menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, serta sebagai penentu arah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun ke depan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan melalui *Rencana Kerja (Renja)* serta sebagai dasar pelaksanaan program kerja lima tahunan;
2. Untuk mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029*, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
3. Untuk menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran program dan kegiatan selama periode lima tahun, agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
4. Untuk memastikan kesesuaian dan keberlanjutan antara kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru, sehingga seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan kewenangan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi kinerja, serta sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode lima tahun mendatang.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok Sasaran layanan Perangkat Daerah;
 - e. Mitra Kerja Perangkat Daerah.
2. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. Tahapan Renstra Perangkat Daerah

5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
2. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
3. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK);

Bab VI PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi publik dan pengelolaan informasi, bidang persandian dan bidang statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjalankan fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik membawahi:
 - a) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Unit Pelaksana Teknis

Gambar 2.1
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Lombok Tengah



a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi

Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, Umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris dinas mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup dinas;
- b) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Dinas;
- c) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas;
- d) Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan dan Standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan lingkup dinas;
- e) Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- f) Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
- g) Pengkoordinasian Kepala Bidang kepala Sub bagian, kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- h) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) dan atau instansi terkait
- i) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j) Pelaksanaan pengendalian, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan

- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan penatakelolaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja sub bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknik pengelolaan administrasi kepegawaian rumah tangga protokol hubungan masyarakat dan perlengkapan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;

- d. Pelaksanaan Pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas dinas;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai perundang-undangan;
 - g. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran dinas;
 - h. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
 - i. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - j. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan aparatur lingkup dinas;
 - k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyiapan barang;
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian;
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasa langsung sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, Pembinaan

administrasi pelaksanaan tugas lingkup bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan program Kerja Seksi lingkup Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c) Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f) Pelaksanaan administrasi lingkup bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan tugas, Pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup bidang Aplikasi Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Aplikasi Informatika;
- b) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan program Kerja Seksi lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
- c) Perumusan kebijakan di bidang Aplikasi Informatika;
- d) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
- e) Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
- f) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang Aplikasi Informatika;
- g) Pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik

Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, Pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - b) Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi lingkup bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - c) Perumusan kebijakan lingkup bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - d) Pelaksanaan kebijakan lingkup bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - e) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Statistik;
 - f) Pelaksanaan administrasi lingkup bidang;
 - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Persandian, keamanan informasi dan Statistik, lingkup tugas bidang Persandian dan keamanan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan Program kerja lingkup seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
- d. Menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi Sandi antar perangkat daerah lingkup Kabupaten;
- e. Menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, Pengelolaan sumberdaya persandian, Operasional pengelolaan komunikasi Sandi dan Operasional Pengamanan komunikasi sandi;
- g. Melaksanakan Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- h. Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan Dan penghancuran informasi Berklasifikasi;

- j. Menyusun rencana kebutuhan Sumber daya manusia sandi dan keamanan informasi;
- k. Melaksanakan upaya peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;
- l. Melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi dan keamanan informasi;
- m. Menyusun rencana kebutuhan dan mengelola perangkat keras dan perangkat lunak persandian dan keamanan informasi;
- n. Menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- o. Melaksanakan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- p. Melaksanakan koordinasi hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- q. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/ aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- r. Melaksanakan pengamanan informasi elektronik;
- s. Melaksanakan pengelolaan security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- t. Melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

- u. Menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, Operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- v. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- w. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unit Pelaksana Teknis

Unit pelaksana teknis Melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau Kegiatan penunjang tertentu.

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pada lingkup dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan Fungsional dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- e. Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

b. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025, jumlah sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ini terdiri atas 40 orang ASN dan 5 orang tenaga non-ASN.

Dari total 40 orang ASN yang terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), susunan jabatan dan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

- 1 orang Kepala Dinas (Eselon II.b);
- 1 orang Sekretaris (Eselon III.a);

- 3 orang Kepala Bidang (Eselon III.b);
- 2 orang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi (Eselon IV.a); dan
- 33 orang staf, yang terdiri atas 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rincian lengkap mengenai komposisi kepegawaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai ASN Menurut Eselon Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Uraian | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Staf | Jmh |
|----|----------------|-----------|------------|-----------|------|-----|
| 1 | Kepala Dinas | 1 | | | | 1 |
| 2. | Sekretaris | | 1 | | | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | | 3 | | | 3 |
| 4. | Kasubbag/ Kasi | | | 2 | | 2 |
| 5. | Staf | | | | 33 | 33 |
| | Jumlah | 1 | 4 | 2 | 33 | 40 |

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan Ruang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Uraian | Golongan Ruang PNS | | | | Golongan Ruang PPPK | | | Jml |
|----|----------------|--------------------|-----|----|---|---------------------|-----|---|-----|
| | | IV | III | II | I | IX | VII | V | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | | | | | | | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 | | | | | | | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | 2 | 1 | | | | | | 3 |
| 4. | Kasubbag/ Kasi | | 2 | | | | | | 2 |
| 5. | Staf | | 14 | 3 | | 12 | 1 | 3 | 33 |
| | Jumlah | 4 | 17 | 3 | | 12 | 1 | 3 | 40 |

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, diketahui bahwa dari total 40 (empat puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lombok Tengah, kelompok pegawai dengan golongan ruang III (PNS) merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak 17 orang atau sekitar 42,5% dari total keseluruhan.

Selanjutnya, golongan IX (PPPK) menempati urutan kedua dengan jumlah 12 orang atau sekitar 30%. Kemudian diikuti oleh golongan IV (PNS) sebanyak 4 orang atau 10%, golongan II (PNS) sebanyak 3 orang atau 7,5%, dan golongan V (PPPK) sebanyak 3 orang atau 7,5%. Adapun golongan VII (PPPK) berjumlah 1 orang atau sekitar 2,5% dari total ASN yang ada.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi oleh pegawai pada jenjang menengah (golongan III), yang umumnya mengisi posisi fungsional dan pelaksana teknis. Sementara itu, proporsi pegawai pada golongan tinggi (IV) dan PPPK pada golongan IX juga relatif signifikan, mencerminkan kebutuhan akan tenaga profesional dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.3

Pendidikan dan Jenis Kelamin Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

| No | Uraian | Pendidikan | | | | | | Jenis Kelamin | | |
|----|---------------|------------|----|----|----|------|------|---------------|----|----|
| | | S3 | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | Jml | Lk | Pr |
| 1 | Kepala Dinas | | | 1 | | | | 1 | 1 | |
| 2. | Sekretaris | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| 3. | Kepala Bidang | | 1 | 2 | | | | 3 | 3 | |
| 4. | Kasubbag/Kasi | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | |
| 5. | Staf | | | 23 | 5 | 5 | | 43 | 21 | 12 |
| | Jumlah | - | 3 | 27 | 5 | 5 | - | 40 | 28 | 12 |

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, diketahui bahwa dari total 40 (empat puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 28 orang pegawai laki-laki atau sekitar 70%, dan 12 orang pegawai perempuan atau sekitar 30% dari keseluruhan jumlah ASN yang ada. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih didominasi oleh pegawai laki-laki, terutama pada jabatan struktural dan teknis.

Jika ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, mayoritas ASN memiliki pendidikan Strata-1 (S1) sebanyak 27 orang atau sekitar 67,5%, yang umumnya menduduki jabatan pelaksana, fungsional, dan pejabat pengawas. Selanjutnya, terdapat 5 orang ASN dengan pendidikan Diploma-3 (D3) dan 5 orang dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) — masing-masing sebesar 12,5% dari total ASN. Adapun ASN dengan pendidikan Strata-2 (S2) berjumlah 3 orang atau sekitar 7,5%, sedangkan belum terdapat ASN dengan kualifikasi Strata-3 (S3) pada tahun 2025.

Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sudah relatif baik, namun masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mendorong pegawai untuk melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana guna mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

2) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Fasilitas yang memadai akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sudah cukup mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan, khususnya dalam hal penguatan infrastruktur teknologi informasi, peremajaan perangkat jaringan, serta optimalisasi pemanfaatan aset digital guna mendukung implementasi Smart Governance dan transformasi digital daerah.

Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana (Data Aset) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah Triwulan II (Januari s/d Juni) Tahun 2025

| REKAPITULASI HASIL REKONSILIASI NILAI ASET | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|----------------------------|-----|
| No | AKUN NERACA | NERACA AWAL 2025 | LRA TRIWULAN II | PENAMBAHAN | | | PENGURANGAN | | | | | | NILAI AKHIR TRIWULAN II | KET |
| | | | | REKLAS | HIBAH | MUTASI | REKLAS | HIBAH | MUTASI | EKSTRA | PENGHAPUSAN | NON ASET | | |
| A | ASET TETAP | 8.167.052.340,43 | 295.396.000 | | | | | | | | | | 8.462.448.340,43 | |
| 1 | KIB A (Tanah) | 1.130.500.000 | | | | | | | | | | | 1.130.500.000 | |
| 2 | KIB B (Peralatan dan Mesin) | 5.922.733.090,43 | 295.396.000 | | | | | | | | | | 6.218.129.090,43 | |
| 3 | KIB C (Gedung dan Bangunan) | 1.108.819.250 | | | | | | | | | | | 1.108.819.250 | |
| 4 | KIB D (Jalan, rigasi, dan Jaringan) | 5.000.000 | | | | | | | | | | | 5.000.000 | |
| 5 | KIB E (Aset Tetap Lainnya) | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 6 | KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| B | ASET LAINNYA | 53.725.000 | 0 | | | | | | | | | | 53.725.000 | |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | Aset Lain-lain | 53.725.000 | | | | | | | | | | | 53.725.000 | |
| C | TOTAL (A+B) | 8.220.777.340,43 | 295.396.000 | 0 | | | 0 | | | | | | 8.516.173.340,43 | |

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa total nilai aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah per Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 8.516.173.340,43. Nilai tersebut mencakup dua kelompok utama, yaitu aset tetap dan aset lainnya.

Dari total tersebut, aset tetap memiliki nilai sebesar Rp 8.462.448.340,43, yang terdiri atas:

- KIB A (Tanah) senilai Rp 1.130.500.000;
- KIB B (Peralatan dan Mesin) senilai Rp 6.218.129.090,43;
- KIB C (Gedung dan Bangunan) senilai Rp 1.108.819.250; dan
- KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) senilai Rp 5.000.000.

Sementara itu, aset lainnya memiliki nilai sebesar Rp 53.725.000, yang seluruhnya tercatat sebagai aset lain-lain.

Secara keseluruhan, nilai aset tersebut menunjukkan bahwa porsi terbesar kekayaan daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berada pada kelompok peralatan dan mesin, yang meliputi perangkat teknologi informasi, jaringan komunikasi, serta perlengkapan operasional pendukung kegiatan dinas. Kondisi ini menggambarkan karakteristik fungsi utama Diskominfo sebagai penyelenggara layanan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian berbasis infrastruktur digital.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026 memuat tujuan utama yaitu *“Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Mendukung Sistem Birokrasi yang Baik dan Pelayanan Publik yang Memuaskan.”*

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi;
3. Meningkatnya tata kelola persandian dan keamanan informasi daerah.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan bidang urusan yang diampu, meliputi komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah setiap tahunnya.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selama periode tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5, yang memuat perkembangan anggaran, realisasi, serta persentase capaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.5.

Program, Anggaran dan Realisasi Tahun 2020 – 2024 Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

| NO. | BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | | | | | REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE (&) | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | | | | REALISASI | % | REALISASI | % | REALISASI | % | REALISASI | % | REALISASI | % |
| 1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.262.583.980 | 2.906.517.869 | | | | 2.178.573.848 | 96,29 | 2.876.860.951 | 98,98 | | | | | | |
| 2. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 202.851.150 | | | | | 187.296.854 | 92,33 | | | | | | | | |
| 3. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 43.651.200 | | | | | 43.633.550 | 99,96 | | | | | | | | |
| 4. | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | 1.028.166.172 | | | | | 496.001.800 | 48,24 | | | | | | | | |
| 5. | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | 247.872.500 | | | | | 237.727.400 | 95,91 | | | | | | | | |
| 6. | PROGRAM PERSANDIAN DAERAH | 18.980.400 | | | | | 18.980.400 | 100 | | | | | | | | |
| 7. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | 436.287.085 | 3.333.229.926 | 3.302.496.624 | 3.886.909.090 | - | - | 410.390.733 | 94,06 | 3.010.260.683 | 90,31 | 3.219.945.762 | 97,50 | 3.683.071.655 | 94,76 |
| 8. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | - | 863.003.268 | 53.715.193 | 2.136.423.638 | 2.101.084.503 | - | - | 815.869.308 | 94,54 | 31.235.800 | 58,15 | 2.082.368.153 | 97,47 | 2.089.792.900 | 99,46 |
| 9. | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | 162.511.950 | 1.161.509.878 | 1.041.578.112 | 1.629.427.478 | - | - | 153.323.250 | 94,35 | 1.137.378.230 | 97,92 | 1.033.066.000 | 99,18 | 1.603.944.673 | 98,44 |
| 10. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | - | 162.088.300 | 124.149.400 | 117.123.426 | 67.882.698 | - | - | 156.415.300 | 96,50 | 100.804.400 | 81,20 | 112.329.500 | 95,91 | 67.160.000 | 98,94 |
| 11. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - | - | 29.999.700 | 20.487.100 | 111.865.828 | - | - | - | 0 | 24.436.700 | 81,46 | 19.541.796 | 95,39 | 107.096.020 | 95,74 |
| | JUMLAH | 3.804.105.402 | 4.530.408.472 | 4.702.604.097 | 6.618.108.900 | 7.797.169.597 | 3.162.213.852 | 83,13 | 4.412.859.542 | 97,41 | 4.304.115.813 | 91,53 | 6.467.251.211 | 97,72 | 7.551.065.248 | 96,84 |

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) mencapai 93,33%. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tergolong sangat baik, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun anggaran.

Realisasi terendah tercatat pada tahun 2020, yang dipengaruhi oleh dampak bencana non-alam pandemi Covid-19, di mana sebagian besar kegiatan pemerintah mengalami refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat kesehatan serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, digitalisasi pemerintahan menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel, membangun sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021–2026 diarahkan untuk memenuhi empat (4) indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Adapun capaian terhadap indikator kinerja tersebut selama periode tahun 2021–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6.

Tujuan, sasaran, indikator dan realisasi 2021 - 2024

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | REALISASI TAHUN | | | | | |
|----|--|---|--|--------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan | Meningkatnya kualitas layanan SPBE | Indeks SPBE | Nilai | 1,65 | 1 | 1,78 | 2,55 | 2,7 | 3,13 | 2,66 | 2,08 | 2,69 | 3,04 | | |
| 2 | | Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 | | | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4 | | meningkatnya tata kelola persandian dan keamanan informasi | Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator utama Renstra Tahun 2021–2026.

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Indeks SPBE digunakan sebagai ukuran tingkat kematangan digitalisasi pemerintahan daerah dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, capaian Indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah 3,04 dengan predikat “Baik”, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2,69 (2023, predikat Cukup Baik), 2,08 (2022), dan 2,66 (2021).

Kenaikan nilai indeks tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerapan kebijakan, tata kelola, dan layanan berbasis elektronik yang melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mengimplementasikan transformasi digital menuju birokrasi yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Dalam rangka meningkatkan penggunaan data statistik oleh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai 100% pemanfaatan data statistik sektoral selama periode 2021–2024, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian ini diperoleh melalui koordinasi yang intensif antara Diskominfo dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan Program Satu Data Indonesia Daerah (SDI-D). Melalui layanan “Lombok Tengah Satu Data”, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

3. Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah mencapai 100% tingkat keamanan informasi pemerintah daerah, sesuai target yang ditetapkan. Upaya penguatan keamanan informasi dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang memiliki mandat nasional dalam penyelenggaraan keamanan siber dan sandi negara.

Implementasi kebijakan keamanan informasi di Kabupaten Lombok Tengah difokuskan pada peningkatan kesadaran keamanan siber, penguatan sistem proteksi data pemerintah daerah, serta penerapan standar keamanan informasi pada infrastruktur jaringan dan aplikasi publik.

4. Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Sebagai bagian dari layanan komunikasi publik, Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah telah membangun dan mengelola portal resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di alamat www.lomboktengahkab.go.id.

Jumlah kunjungan situs tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan — dari 29.110 pengunjung pada tahun 2023 menjadi 142.535 pengunjung pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 490%. Peningkatan

ini menunjukkan kepercayaan dan ketergantungan masyarakat terhadap kanal informasi resmi pemerintah daerah.

Selain itu, Diskominfo juga telah mengembangkan sejumlah sistem dan aplikasi e-government, antara lain:

- Aplikasi SIA SPBE – untuk pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE daerah.
- Aplikasi PMKS (Pendataan Anak Yatim Piatu).
- Aplikasi SIMADU (Sistem Informasi Manajemen, Pengawasan, Tindak Lanjut, dan Pengaduan).
- Aplikasi SIPETI (Sistem Pendataan Stunting).
- Portal LOMBOK TENGAH (Portal Layanan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah).
- Aplikasi GIS MENARA (Pendataan Menara Telekomunikasi).
- Dokumen Arsitektur SPBE Buku I s.d. VII sebagai pedoman pembangunan sistem terintegrasi.
- SIPD–SIMDA Penganggaran, e-Monev, SIMTASKIN, SIMPBB, SIMPEG, SIMKESDA, e-Audit, SIAK, e-Procurement, SIM Barang/Jasa, serta pengembangan SIMDA Perencanaan dan Peta Rencana SPBE.

Saat ini, 32 website Perangkat Daerah (PD) telah terintegrasi dalam satu infrastruktur server Dinas Komunikasi dan Informatika, yang juga menampung berbagai aplikasi pelayanan publik.

Website layanan publik yang telah berjalan antara lain:

- Website Korona (Informasi Covid-19)
- Website GIS Menara Telekomunikasi
- Website Portal Lombok Tengah
- Website Satu Data

- Website PPID
5. Keterbukaan Informasi Publik dan Penghargaan PPID

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah dilakukan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen publik agar masyarakat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang menjadi dasar pelaksanaan layanan informasi publik di seluruh badan publik daerah.

Prestasi dalam bidang keterbukaan informasi publik antara lain:

- Tahun 2024, PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik Menuju Informatif kategori kabupaten/kota.
- Tahun 2023, Desa Kawo memperoleh penghargaan Desa Transparan Peringkat III Wilayah Indonesia Timur dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2023.
- Tahun 2024, Desa Aik Mual mewakili Provinsi NTB dan meraih Peringkat IV Kategori Desa Berkembang dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik hingga ke tingkat desa.

6. Tantangan dan Arah Pengembangan ke Depan

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang baik, pengembangan sistem informasi di Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Keterbatasan server fisik dan virtual, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyimpanan (storage server).
- Perlunya perluasan infrastruktur jaringan dan bandwidth dedicated agar mendukung akses data dan layanan publik yang lebih cepat.
- Perlunya peningkatan komitmen dan konsistensi seluruh perangkat daerah dalam mengelola serta memperbarui konten pada website dan aplikasi masing-masing.
- Kebutuhan akan peremajaan perangkat keras dan penguatan keamanan sistem untuk mendukung pelayanan publik digital yang berkelanjutan.

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mencakup seluruh pihak yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian di tingkat daerah.

Secara umum, kelompok sasaran tersebut terdiri atas dua kelompok utama, yaitu:

1. Masyarakat (Publik Eksternal)

Masyarakat merupakan penerima manfaat langsung dari berbagai layanan publik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, baik dalam bentuk layanan informasi, komunikasi publik, maupun layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Bentuk pelayanan kepada masyarakat antara lain:

- Penyediaan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat melalui portal resmi, media sosial, dan aplikasi layanan publik.
- Fasilitasi akses keterbukaan informasi publik melalui sistem PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- Pengelolaan jaringan komunikasi dan infrastruktur digital daerah untuk mendukung keterjangkauan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Edukasi dan literasi digital masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara produktif dan aman.

2. Perangkat Daerah (Publik Internal Pemerintah Daerah)

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Layanan yang diberikan kepada perangkat daerah mencakup:

- Fasilitasi pengembangan dan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah melalui implementasi *Satu Data Indonesia Daerah (SDI-D)* dan *Government Technology Platform (PEPADU)*.

- Pengelolaan jaringan infrastruktur dan pusat data (data center) untuk mendukung efisiensi operasional serta keamanan data pemerintah daerah.
- Pendampingan teknis, monitoring, dan evaluasi terhadap penerapan SPBE, pengelolaan website resmi perangkat daerah, serta pelaksanaan keamanan informasi.
- Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan komunikasi publik agar penyampaian informasi pemerintah bersifat satu narasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, baik dalam konteks penyediaan data dan informasi publik maupun dalam mendukung transformasi digital pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan.

Seluruh layanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

e. Mitra Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang *Kedudukan,*

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang komunikasi publik dan pengelolaan informasi, persandian dan keamanan informasi, serta statistik sektoral.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan komunitas masyarakat untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan layanan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Adapun mitra kerja utama yang berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah antara lain sebagai berikut:

1. Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Berperan dalam pembinaan dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penyampaian informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendorong terwujudnya badan publik yang informatif.
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB Menjadi mitra strategis dalam pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran lokal agar konten siaran di wilayah Kabupaten Lombok Tengah informatif, edukatif, berimbang, serta mendukung pembangunan

daerah. Kemitraan ini juga mendukung peningkatan literasi media dan penyiaran publik yang sehat.

3. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
KIM berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam diseminasi informasi pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Diskominfo berperan melakukan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan terhadap KIM agar mampu menjadi corong komunikasi pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
4. Media Massa (Cetak, Elektronik, dan Online)
Media menjadi mitra penting dalam publikasi kegiatan, kebijakan, serta capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyampaian informasi yang layak, benar, dan berimbang kepada masyarakat.
5. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah
Bermitra dalam penyediaan dan sinkronisasi data statistik sektoral melalui pelaksanaan *Satu Data Indonesia Daerah (SDI-D)*. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy).
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Menjadi mitra teknis dalam bidang persandian dan keamanan informasi, terutama dalam peningkatan kapasitas keamanan siber, penguatan sistem enkripsi data pemerintah daerah, serta pelaksanaan audit keamanan informasi untuk memastikan terjaganya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data digital pemerintah daerah.

7. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI)

Melalui koordinasi program nasional seperti SPBE, Smart City, Government Technology (GovTech INA), dan penguatan literasi digital nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah berkolaborasi aktif dalam sinkronisasi kebijakan pusat-daerah guna mendukung transformasi digital daerah yang terpadu.

8. Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi (seperti Universitas Mataram, Politeknik Negeri Mataram, dan lainnya)

Bermitra dalam kegiatan penelitian, pengembangan inovasi TIK, dan peningkatan kompetensi SDM, baik ASN maupun masyarakat, terutama di bidang komunikasi digital, keamanan siber, dan statistik spasial.

Kemitraan dengan berbagai pihak tersebut merupakan wujud implementasi prinsip kolaboratif governance dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika daerah. Dengan dukungan sinergis dari seluruh mitra kerja, diharapkan pengelolaan informasi publik, penyiaran, statistik sektoral, serta keamanan siber di Kabupaten Lombok Tengah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital nasional.

2. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Perumusan permasalahan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan maupun hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan dan capaian program selama periode 2021–2024, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi di sebagian perangkat daerah masih belum merata. Pengembangan, pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap sistem aplikasi dan layanan SPBE belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi. Hal ini menyebabkan efisiensi dan interoperabilitas antar layanan digital masih terbatas, sehingga pemanfaatan SPBE belum memberikan dampak maksimal terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

2) Belum Meratanya Pemahaman dan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik

Meskipun Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki PPID Utama dan PPID Pelaksana di setiap perangkat daerah, hasil evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menunjukkan bahwa sebagian perangkat daerah dan pemerintah desa belum sepenuhnya memahami prinsip, standar, dan tata cara pelayanan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Akibatnya, penyampaian informasi publik belum seragam dan masih terdapat keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.

3) Fragmentasi dan Belum Terwujudnya Integrasi Data Antar Perangkat Daerah

Pengelolaan data sektoral di lingkungan pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip *Satu Data Indonesia*. Setiap perangkat daerah memiliki basis data sendiri dengan format, struktur, dan standar yang berbeda. Kondisi ini menghambat interoperabilitas dan berbagi pakai data (data sharing), sehingga proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan belum sepenuhnya berbasis data yang terintegrasi.

4) Meningkatnya Ancaman Keamanan Siber dan Kebocoran Data

Dalam era digital, ancaman terhadap keamanan informasi terus meningkat. Namun kesadaran keamanan siber di lingkungan perangkat daerah masih relatif rendah, sementara jumlah personel yang memiliki kompetensi teknis di bidang keamanan informasi juga terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, serangan *malware*, atau *ransomware* yang dapat mengganggu stabilitas layanan pemerintahan daerah.

5) Masih Rendahnya Literasi Digital Masyarakat, Terutama di Wilayah Pedesaan

Sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, belum memiliki kemampuan memadai dalam menggunakan perangkat digital secara produktif dan aman. Rendahnya pemahaman terhadap penggunaan internet, media sosial, dan aplikasi layanan publik menghambat efektivitas diseminasi informasi dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan digital daerah.

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan tersebut menggambarkan bahwa tantangan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah terletak pada penguatan tata kelola digital, peningkatan integrasi data dan keamanan informasi, serta pemberdayaan masyarakat menuju literasi digital yang inklusif. Permasalahan ini menjadi dasar perumusan isu strategis dan arah kebijakan pengembangan SPBE daerah yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

b. Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Isu strategis merupakan kondisi, kecenderungan, atau permasalahan penting yang berpotensi memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.

Isu-isu ini disimpulkan berdasarkan hasil identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, baik yang bersumber dari evaluasi internal maupun dinamika lingkungan eksternal yang meliputi aspek global, nasional, dan regional. Melalui analisis isu strategis ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan, strategi, dan arah pengembangan SPBE daerah yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Tengah.

Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 dirangkum dalam Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7.

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis – Global | Isu Lingkungan Dinamis – Nasional | Isu Lingkungan Dinamis – Regional | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik | Belum optimalnya penerapan SPBE di seluruh perangkat daerah | Keterpaduan tata kelola dan efisiensi penggunaan sumber daya digital | Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang sangat cepat | Implementasi SPBE Nasional dan kebijakan <i>Satu Data Indonesia</i> | Kesiapan infrastruktur digital dan SDM TIK daerah | Rendahnya Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) dan belum optimalnya penerapan SPBE terintegrasi |
| Kewenangan dalam pengelolaan informasi publik dan komunikasi pemerintahan | Belum meratanya pemahaman keterbukaan informasi publik di perangkat daerah dan desa | Transparansi dan partisipasi publik | Meningkatnya isu kepercayaan publik terhadap informasi digital dan hoaks global | Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan kebijakan komunikasi publik terpadu | Kesenjangan literasi informasi antarwilayah | Masih rendahnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan literasi komunikasi digital |
| Pengelolaan data statistik sektoral melalui kebijakan Satu Data Indonesia | Fragmentasi data antar perangkat daerah dan belum ada integrasi penuh | Efisiensi penggunaan data dan pengambilan keputusan berbasis bukti | Isu <i>Big Data Governance</i> dan keamanan data global | Pelaksanaan <i>Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</i> | Belum sinkronnya sistem data sektoral daerah | Belum optimalnya nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan pemanfaatan portal Satu Data Lombok Tengah |
| Keamanan siber dan perlindungan data pemerintah daerah | Ancaman kebocoran data dan meningkatnya serangan siber | Ketertanggung terhadap sistem elektronik yang meningkatkan risiko siber | Ancaman keamanan siber global dan serangan lintas negara | Serangan siber pada skala nasional terhadap instansi pemerintah | Daerah terdampak gangguan sosial dan ekonomi akibat insiden siber | Rendahnya tingkat kesiapan keamanan informasi daerah dan minimnya kapasitas personel keamanan siber |
| Komunikasi publik dan literasi digital masyarakat | Masih rendahnya literasi digital masyarakat desa | Peningkatan kualitas SDM dan pemerataan akses informasi | Isu disinformasi dan <i>hoaks</i> global | Program literasi digital nasional dan <i>Gerakan Nasional Literasi Digital</i> | Disparitas digital antarwilayah di NTB | Rendahnya Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan kesenjangan literasi digital masyarakat pedesaan |

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pada Tabel 2.7, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menghadapi sejumlah isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Isu-isu strategis tersebut menjadi fokus utama dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan komunikasi dan informatika daerah periode 2025–2029 sebagai berikut:

1. Rendahnya Nilai Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)

Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) menggambarkan tingkat kematangan implementasi pemerintahan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai PEMDI Kabupaten Lombok Tengah yang masih tergolong rendah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Belum meratanya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan di seluruh wilayah;
- Rendahnya kompetensi dan literasi digital aparatur;
- Belum optimalnya tata kelola data, interoperabilitas sistem, dan integrasi layanan lintas perangkat daerah;
- Lemahnya kesiapan keamanan siber serta perlindungan data pribadi.
- Untuk meningkatkan nilai PEMDI, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Penguatan infrastruktur dan konektivitas digital di seluruh wilayah pelayanan publik;
- Peningkatan kapasitas ASN dan literasi digital aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi TIK;
- Penyempurnaan tata kelola data dan arsitektur SPBE daerah, termasuk interoperabilitas sistem layanan;
- Peningkatan keamanan siber dan manajemen risiko melalui kerja sama dengan BSSN dan GovTech INA;
- Kolaborasi lintas perangkat daerah untuk integrasi layanan publik berbasis digital yang efisien.

2. Masih Rendahnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mencerminkan sejauh mana badan publik menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Nilai IKIP yang masih rendah disebabkan oleh:

- Belum kuatnya komitmen pimpinan dan aparatur terhadap prinsip keterbukaan informasi publik;
- Rendahnya kompetensi dan kapasitas petugas PPID Pelaksana di perangkat daerah dan desa;
- Belum optimalnya digitalisasi pelayanan informasi publik dan mekanisme pengelolaan permohonan informasi;
- Kurangnya evaluasi dan pembinaan berkala terhadap kepatuhan badan publik.
- Upaya peningkatan IKIP diarahkan melalui:

- Penguatan kelembagaan dan tata kelola PPID, baik di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah;
 - Peningkatan literasi dan budaya keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan;
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan PPID secara digital dan terintegrasi;
 - Monitoring dan evaluasi kepatuhan badan publik secara periodik bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi NTB.
3. Belum Optimalnya Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) mengukur kapasitas, kualitas, dan kinerja penyelenggaraan statistik sektoral di daerah sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy).

Rendahnya IPS disebabkan oleh:

- Fragmentasi dan duplikasi data antarperangkat daerah yang belum terintegrasi;
- Lemahnya koordinasi antara Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data;
- Kurangnya pemanfaatan portal Satu Data Lombok Tengah;
- Rendahnya kompetensi SDM pengelola data sektoral.
- Upaya peningkatan IPS diarahkan melalui:
- Penguatan kelembagaan dan tata kelola data statistik sektoral sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

- Implementasi konsisten kebijakan Satu Data Indonesia Daerah (SDI-D) di seluruh perangkat daerah;
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola data melalui pelatihan statistik dan manajemen data;
- Integrasi sistem informasi sektoral dengan Portal Satu Data Lombok Tengah sebagai pusat data daerah.

4. Rendahnya Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi

Tingkat kesiapan keamanan informasi menunjukkan kemampuan organisasi dalam melindungi data, infrastruktur, dan sistem dari ancaman siber. Kondisi kesiapan yang masih rendah memperlihatkan bahwa kemampuan mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari serangan siber belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh:

- Terbatasnya personel yang memiliki kompetensi keamanan siber;
- Belum terbentuknya mekanisme penanganan insiden keamanan informasi yang baku;
- Rendahnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya keamanan data dan kerahasiaan informasi;
- Minimnya alokasi sumber daya untuk proteksi dan pemeliharaan sistem keamanan informasi.
- Upaya peningkatan kesiapan keamanan informasi diarahkan pada:
- Pembentukan dan operasionalisasi Tim CSIRT Daerah (Computer Security Incident Response Team) bekerja sama dengan BSSN;

- Penyusunan kebijakan keamanan informasi daerah sesuai Standar Nasional BSSN;
 - Audit dan manajemen risiko keamanan informasi secara berkala;
 - Peningkatan kesadaran dan literasi keamanan siber ASN melalui pelatihan dan simulasi insiden.
5. Rendahnya Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) mengukur tingkat literasi, pemberdayaan, dan pemanfaatan teknologi digital masyarakat dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan digital.

Nilai IMDI yang masih rendah di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh:

- Kesenjangan literasi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan;
- Belum meratanya akses internet, infrastruktur digital, dan perangkat pendukung;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital;
- Meningkatnya potensi kejahatan siber seperti phishing, penipuan daring, dan pencurian data pribadi.
- Upaya peningkatan IMDI diarahkan pada:
- Pemerataan akses dan inklusi digital melalui penyediaan jaringan internet publik dan Wi-Fi gratis di area strategis;
- Pelaksanaan program literasi digital masyarakat secara kolaboratif dengan Kominfo RI, komunitas, dan lembaga pendidikan;

- Pemberdayaan komunitas digital desa melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan relawan TIK;
- Penyediaan ruang publik digital yang aman dan produktif, serta kampanye perlindungan data pribadi.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah. Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 - 2029 :

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYASAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)

Makna dari visi tersebut adalah:

- a. Mandiri merupakan gambaran kondisi daerah yang mampu memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan kewenangan otonominya;
- b. Berdayasaing menggambarkan kualitas prima sumberdaya Lombok Tengah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya tersebut dapat menjadi produk unggulan daerah yang mengisi kebutuhan regional, nasional maupun internasional;
- c. Sejahtera menggambarkan masyarakat Lombok Tengah yang makmur, bebas dari kemiskinan dan aman;

- d. Harmonis menggambarkan masyarakat yang hidup dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar semua elemen masyarakat dengan berbasis keimanan dan berkebudayaan lokal;

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas;
- b. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau;
- c. Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah
- e. Mengintegrasikan nilai Ahlaqul Karimah dan nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam mensukseskan apa yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menitik beratkan dalam pencapaian misi ke-2 dan ke-3 yaitu :

- a. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau;
Dengan Tujuan Kepemerintahan yang Baik, dan sasarannya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Melayani.
- c. Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
Dengan Tujuan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, dan sasarannya Transformasi Digital.

Indikator yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Adalah indikator Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI), Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, Persentase layanan pemerintahan yang terdigitalisasi,

Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah tahun 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital”**.

Tujuan tersebut menggambarkan arah perubahan strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam lima tahun mendatang, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi daerah “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (MASMIRAH).”

Transformasi layanan publik berbasis digital bermakna adanya perubahan sistemik, terencana, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara lebih rinci, tujuan ini mencakup dimensi-dimensi berikut:

1) Digitalisasi Layanan Publik Daerah

Mendorong seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengubah proses pelayanan manual menjadi layanan digital dengan prinsip mudah diakses, cepat, dan transparan melalui pemanfaatan sistem informasi

yang terintegrasi dalam Platform e-Government Terpadu (PEPADU).

- 2) Integrasi Sistem dan Data Pemerintah Daerah Mewujudkan interoperabilitas antar aplikasi dan sinkronisasi data antar PD melalui penerapan Arsitektur dan Roadmap SPBE Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029, selaras dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
- 3) Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Digital Pemerintah Daerah
Menjamin tersedianya jaringan, pusat data, dan sistem keamanan informasi yang andal, modern, dan terhubung dengan Pusat Data Nasional (PDN), termasuk pengembangan mini-SOC (Security Operation Center) dan CSIRT Daerah (Computer Security Incident Response Team) untuk melindungi layanan publik digital.
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Digital
Mengembangkan kompetensi aparatur dalam bidang teknologi informasi, komunikasi publik, keamanan siber, dan manajemen data melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan kementerian terkait.
- 5) Optimalisasi Literasi Digital Masyarakat
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik digital secara aman, cerdas, dan produktif melalui kegiatan literasi digital, sosialisasi SPBE, dan kampanye publik berbasis komunitas.
- 6) Percepatan Inovasi dan Kolaborasi Digital
Mendorong inovasi pelayanan publik digital melalui kompetisi, inkubasi ide, dan sinergi lintas sektor dengan

dunia usaha, akademisi, dan komunitas (*triple helix*), guna mempercepat pencapaian transformasi digital daerah.

2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Sasaran menjadi arah dan ukuran kinerja yang lebih terukur untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan strategis.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital

Sasaran ini mencerminkan arah pembangunan menuju pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penerapan teknologi digital. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital dilakukan melalui:

- Pengembangan dan integrasi berbagai aplikasi pelayanan publik dalam Platform e-Government Terpadu (PEPADU).
- Penerapan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Perangkat Daerah (PD).
- Penguatan tata kelola layanan publik berbasis data, digital signature, dan pelayanan daring lintas sektor.
- Pengembangan kanal komunikasi publik digital, termasuk website, media sosial resmi pemerintah daerah, dan layanan informasi publik berbasis mobile.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan digital pemerintah melalui survei kepuasan, evaluasi berkala, dan inovasi layanan baru.

Sasaran ini sejalan dengan kebijakan nasional SPBE serta mendukung pencapaian visi MASMIRAH, khususnya dalam aspek kemandirian dan daya saing daerah berbasis digital.

2. Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan

Sasaran ini bertujuan untuk membangun sistem data dan informasi yang terpadu, valid, mutakhir, dan konsisten sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

Langkah-langkah utama untuk mencapai sasaran ini meliputi:

- Penguatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) Daerah melalui koordinasi lintas PD dan BPS Kabupaten Lombok Tengah.
- Penerapan standar metadata, kode referensi, dan interoperabilitas data agar seluruh data daerah dapat terintegrasi dalam portal data daerah.
- Pengembangan dan pemeliharaan Portal Statistik Daerah Lombok Tengah sebagai pusat data terbuka dan sumber informasi publik yang terpercaya.
- Meningkatkan kapasitas pengelola data di PD melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi kompetensi statistik sektoral.
- Menjamin ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas sebagai bahan evaluasi pembangunan dan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dengan terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan memiliki landasan data yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.

3. Meningkatnya Keamanan Informasi

Sasaran ini menekankan pentingnya perlindungan aset informasi pemerintah daerah dari ancaman siber, kebocoran data, maupun gangguan operasional.

Peningkatan keamanan informasi akan dilakukan melalui:

- Penerapan kebijakan keamanan informasi dan manajemen risiko SPBE sesuai standar nasional dan internasional (ISO/IEC 27001).
- Pembentukan dan penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Daerah sebagai garda terdepan penanganan insiden siber.
- Pengembangan mini-Security Operation Center (SOC) untuk memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi ancaman secara real-time.
- Implementasi sistem cadangan data (backup), pemulihan bencana (*disaster recovery system*), serta integrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN).
- Peningkatan kesadaran keamanan siber bagi ASN melalui pelatihan, kampanye literasi keamanan digital, dan penerapan protokol keamanan jaringan di seluruh PD.

Dengan meningkatnya keamanan informasi, penyelenggaraan pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Tengah akan lebih andal, terpercaya, dan berkelanjutan.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran ini mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja dalam setiap penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini antara lain:

- Penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berbasis indikator hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan kinerja, keuangan, dan pelaporan (seperti e-Sakip, e-Planning, dan e-Budgeting).
- Peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan predikat minimal “Baik”.
- Penguatan budaya kerja berbasis kinerja, integritas, dan pelayanan publik.
- Kolaborasi dengan Inspektorat Daerah dan Bappeda dalam pembinaan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, Diskominfo Lombok Tengah akan menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat sebagai motor penggerak transformasi digital daerah.

Untuk lebih jelas tujuan dan sasaran beserta indikator serta target jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

2.16.2.21.2.20.17.0000 – Dinas Komunikasi Dan Informatika

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-------------------------------------|--|--|---|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Meningkatnya Daya Saing Pemuda | Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital | Meningkatnya daya saing pemuda melalui optimalisasi layanan digital pemerintah | Indeks Pemdi (Poin) | – | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Poin) | 87,68 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | |
| | | | Persentase layanan pemerintah yang terdigitalisasi (%) | 41,70 | 45,75 | 47,77 | 49,80 | 51,82 | 53,85 | 55,87 | |
| | | | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (Indeks) | 45,97 | 46,32 | 46,67 | 47,02 | 47,36 | 47,71 | 48,06 | |
| | | Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat dan Dapat Diandalkan | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 64,83 | 76,77 | 80,01 | 81,30 | 82,60 | 83,89 | 85,18 | |
| | | Meningkatnya Keamanan Informasi | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 13,51 | 13,62 | 13,4 | 19,06 | 21,79 | 24,51 | 27,23 | |

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat digambarkan bahwa Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah disusun dengan mengacu pada NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan, yaitu peningkatan daya saing pemuda melalui transformasi layanan publik berbasis digital. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital sebagai fondasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis yang saling terkait, meliputi peningkatan daya saing pemuda melalui optimalisasi layanan digital pemerintah, peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah. Setiap sasaran diukur dengan indikator kinerja yang spesifik dan terukur, antara lain Indeks Pemuda, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, persentase layanan pemerintah yang terdigitalisasi, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), Indeks Pembangunan Statistik (IPS), nilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah, serta tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah.

Secara garis besar, kondisi awal (baseline) tahun 2024 menunjukkan capaian yang beragam pada setiap indikator, yang kemudian ditingkatkan secara bertahap melalui penetapan target kinerja tahunan dari tahun 2025 hingga 2030. Seluruh indikator menunjukkan arah kebijakan yang progresif dengan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi layanan, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan ekosistem

masyarakat digital, perbaikan kualitas data statistik, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan aspek keamanan informasi. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan keterpaduan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagai dasar pelaksanaan transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan.

3. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah perlu merumuskan strategi yang komprehensif, terarah, sinkron, dan konsisten dengan kebijakan pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika.

Strategi-strategi ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Melaksanakan percepatan transformasi digital melalui integrasi aplikasi pemerintahan dan layanan publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Langkah strategis meliputi:

- a. Pengembangan Platform E-Government Terpadu (PEPADU) sebagai pusat layanan digital Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Integrasi sistem administrasi pemerintahan, layanan publik, dan manajemen kepegawaian;
 - c. Penguatan interoperabilitas antarperangkat daerah berbasis arsitektur SPBE.
2. Penguatan Infrastruktur TIK Daerah
- Membangun dan memperluas infrastruktur digital sebagai fondasi transformasi pemerintahan dan layanan publik.
- Langkah strategis meliputi:
- a. Peningkatan konektivitas jaringan internet hingga ke seluruh kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. Pengembangan dan optimalisasi Data Center, *Disaster Recovery Center* (DRC), dan *Command Center* daerah;
 - c. Pemanfaatan teknologi cloud computing dan jaringan *fiber optic* untuk efisiensi layanan digital.
3. Implementasi Satu Data Lombok Tengah
- Mewujudkan pengelolaan data sektoral yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
- Langkah strategis meliputi:
- a. Penguatan peran Wali Data dan Produsen Data pada setiap perangkat daerah;
 - b. Sinkronisasi dengan kebijakan Satu Data Indonesia sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019;
 - c. Pengembangan Portal Satu Data Lombok Tengah sebagai pusat akses data daerah;
 - d. Penyusunan metadata standar dan sistem interoperabilitas data lintas sektor.

4. Pengembangan Smart City

Mendorong inovasi layanan publik dan tata kelola kota cerdas melalui pemanfaatan teknologi digital.

Langkah strategis meliputi:

- a. Integrasi sistem pelayanan publik berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI);
- b. Pengembangan Dashboard Smart City untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah;
- c. Kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan solusi digital yang ramah pengguna dan inklusif bagi masyarakat.

5. Peningkatan Literasi dan Kompetensi Digital ASN serta Masyarakat

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan aman.

Langkah strategis meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan Digital Leadership Academy bagi ASN;
- b. Pelaksanaan Gerakan Literasi Digital Lombok Tengah di tingkat masyarakat desa dan sekolah;
- c. Kolaborasi dengan komunitas digital, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam edukasi publik.

6. Penguatan Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber

Menjamin keamanan sistem, jaringan, dan data pemerintah daerah dari berbagai ancaman siber.

Langkah strategis meliputi:

- a. Penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi nasional yang berpedoman pada regulasi BSSN;
- b. Pembentukan dan operasionalisasi Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) daerah;

- c. Implementasi manajemen risiko siber, enkripsi data, serta audit keamanan informasi secara berkala;
 - d. Sosialisasi dan pelatihan kesadaran keamanan digital bagi ASN.
7. Kolaborasi Multipihak dan Inovasi Ekosistem Digital
- Mengembangkan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
- Langkah strategis meliputi:
- a. Kerja sama dengan operator telekomunikasi, BUMN, sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan komunitas digital;
 - b. Sinergi dengan pemerintah provinsi, BSSN, Kominfo RI, dan GovTech INA dalam pengembangan layanan digital;
 - c. Fasilitasi dan dukungan bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta pelaku inovasi digital lokal;
 - d. Mendorong pemanfaatan skema pendanaan alternatif seperti DAK TIK, CSR, dan Public-Private Partnership (PPP) untuk percepatan transformasi digital.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu menjadi penggerak utama terwujudnya pemerintahan digital yang efektif, aman, transparan, dan inklusif, serta memperkuat posisi Lombok Tengah sebagai daerah cerdas (Smart Regency) yang berdaya saing digital di tingkat nasional.

4. Tahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Tahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah direncanakan selama 5 tahapan yang dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

| Tahap I (2026) | Tahap II (2027) | Tahap III (2028) | Tahap IV (2029) | Tahap V (2030) |
|--|---|--|--|--|
| <p>Konsolidasi dan Penguatan Dasar SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis SPBE. • Pemantapan struktur tim koordinasi SPBE dan PPID. • Peningkatan kapasitas ASN di bidang TIK dan data. • Pembangunan infrastruktur dasar jaringan dan pusat data lokal. • Penguatan tata kelola keamanan informasi awal. | <p>Integrasi dan Optimalisasi Layanan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan portal pelayanan publik terpadu <i>PEPADU</i>. • Integrasi sistem antar-Perangkat Daerah melalui API dan metadata standar. • Implementasi <i>e-Office</i> dan <i>e-Arsip</i> di seluruh PD. • Peningkatan nilai IKIP dan IMDI. • Penilaian dan peningkatan Indeks Keamanan Informasi. | <p>Ekspansi dan Interoperabilitas Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi penuh antar-sistem layanan publik dan data sektoral. • Peningkatan konektivitas antar-kecamatan dan pengembangan Desa Digital. • Implementasi penuh kebijakan <i>Satu Data Indonesia Daerah</i>. • Penguatan keamanan informasi berbasis SIEM dan CSIRT daerah. | <p>Inovasi dan Layanan Publik Cerdas (Smart Regency)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi <i>Big Data Analytics</i> dan <i>Dashboard Kinerja Daerah</i>. • Pengembangan layanan publik berbasis AI dan <i>chatbot</i>. • Penerapan manajemen risiko keamanan siber. • Peningkatan signifikan nilai PEMDI dan SAKIP PD. | <p>Kemandirian dan Keberlanjutan Digital Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi seluruh layanan digital yang terintegrasi dan inklusif. • Pemantapan budaya kerja digital ASN. • Kemandirian pengelolaan data dan keamanan informasi daerah. • Peningkatan nilai PEMDI $\geq 1,9$ dan SAKIP PD $\geq 85,18$. |

Berdasarkan tabel di atas, maka pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan besar yaitu *“Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital.”*

Dengan demikian, penahapan tersebut menggambarkan peta jalan (roadmap) transformasi digital yang komprehensif—mulai dari penguatan dasar, integrasi, inovasi, hingga kemandirian—sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, aman, dan berkelanjutan sejalan dengan visi MASMIRAH.

5. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Perumusan arah kebijakan merupakan langkah penting dalam mengoperasionalisasikan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Arah kebijakan berfungsi sebagai panduan implementatif agar setiap program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berjalan secara terarah, terukur, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan daerah.

Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, seluruh arah kebijakan dinas harus sejalan dengan agenda prioritas daerah, khususnya dalam mewujudkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah dan Birokrasi yang Adaptif, Bersih, dan Melayani.

Untuk lebih jelas tehnik merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|--|--|---|---|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | |
| - Meningkatnya Daya Saing Pemuda | Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital | | Indeks Pemdi (Poin) | - | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Poin) | 87,68 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | |
| | | | Persentase layanan pemerintah yang terdigitalisasi (%) | 41,70 | 45,75 | 47,77 | 49,80 | 51,82 | 53,85 | 55,87 | |
| | | | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (Indeks) | 45,97 | 46,32 | 46,67 | 47,02 | 47,36 | 47,71 | 48,06 | |
| | | Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat dan Dapat Diandalkan | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | 64,83 | 76,77 | 80,01 | 81,30 | 82,60 | 83,89 | 85,18 | |
| | | Meningkatnya Keamanan Informasi | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | 13,51 | 13,62 | 16,34 | 19,06 | 21,79 | 24,51 | 27,23 | |

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, perumusan tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah disusun selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan, khususnya dalam mendukung peningkatan daya saing pemuda melalui transformasi layanan publik berbasis digital. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang berkualitas, akuntabel, aman, serta didukung oleh data dan statistik yang andal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis beserta indikator kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Sasaran peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital diukur melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik, persentase layanan pemerintah yang terdigitalisasi, dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Seluruh indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari kondisi baseline tahun 2024 hingga target akhir tahun 2030, yang mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperluas digitalisasi layanan, meningkatkan transparansi informasi, serta mendorong literasi dan partisipasi digital masyarakat.

Selain itu, sasaran terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang ditargetkan meningkat secara bertahap hingga tahun 2030. Hal ini menunjukkan upaya penguatan tata kelola data dan statistik sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data di daerah.

Sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah direpresentasikan melalui Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, yang ditargetkan meningkat signifikan dari baseline tahun 2024 hingga mencapai kategori

kinerja yang lebih baik pada akhir periode Renstra. Peningkatan ini mencerminkan penguatan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, aspek keamanan informasi menjadi sasaran penting yang diukur melalui Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Target yang terus meningkat hingga tahun 2030 menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan data, sistem informasi, dan infrastruktur digital pemerintah daerah dalam menghadapi risiko dan ancaman siber.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan kerangka perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada hasil, dengan fokus utama pada percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan tata kelola data dan statistik, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pengamanan informasi secara berkelanjutan hingga tahun 2030.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan bentuk implementasi operasional dari kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Perumusan program dan kegiatan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*SPBE*), serta percepatan transformasi digital di seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat.

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun dengan memperhatikan:

- Keterkaitan dengan kebijakan nasional dan daerah, seperti RPJMN, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, serta Arsitektur SPBE Nasional;
- Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, infrastruktur TIK, maupun pendanaan;
- Indikator kinerja yang terukur, sesuai dengan kerangka *performance-based budgeting* (anggaran berbasis kinerja); dan
- Prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, untuk menjamin pelaksanaan program secara efektif.

Dengan demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan Renstra Tahun 2025–2029, yaitu “*Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital.*”

Perencanaan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan secara indikatif selama periode lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

a. Program

Program merupakan rangkaian rencana kerja yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi yang berisi kumpulan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Setiap program disusun berdasarkan kebijakan, strategi, serta arah pembangunan daerah, dan berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Lombok Tengah. Program harus mencerminkan upaya nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*SPBE*), serta memperluas jangkauan transformasi digital masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan wajib memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian hasil (outcome) dan efektivitas pelaksanaan. Indikator tersebut dapat berupa angka, persentase, rasio, indeks, atau parameter kualitatif lainnya yang bersifat terukur, relevan, dan langsung berkaitan dengan tujuan program.

Melalui indikator kinerja tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan dapat dievaluasi

secara objektif, transparan, dan akuntabel, guna memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029.

Program-program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.



Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------|-------------------|-------|--------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 11.344.326.000,00 | | 11.684.658.000,00 | | | 12.035.199.000,00 | | | 12.396.256.000,00 | | 12.768.145.000,00 | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.954.969.000,00 | | 5.103.619.000,00 | | | 5.256.728.000,00 | | | 5.414.430.000,00 | | 5.576.863.000,00 | |
| Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 4.954.969.000,00 | 100 | 5.103.619.000,00 | 100 | | 5.256.728.000,00 | 100 | | 5.414.430.000,00 | 100 | 5.576.863.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | 3.388.689.000,00 | | 3.490.350.000,00 | | | 3.595.061.000,00 | | | 3.702.913.000,00 | | 3.814.001.000,00 | |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 41,70 | 45,75 | 49,80 | 3.388.689.000,00 | 53,85 | 3.490.350.000,00 | 57,89 | | 3.595.061.000,00 | 61,94 | | 3.702.913.000,00 | 65,99 | 3.814.001.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 3.000.668.000,00 | | 3.090.689.000,00 | | | 3.183.410.000,00 | | | 3.278.913.000,00 | | 3.377.281.000,00 | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) | 28,89 | 46,67 | 64,44 | 3.000.668.000,00 | 68,89 | 3.090.689.000,00 | 71,11 | | 3.183.410.000,00 | 73,33 | | 3.278.913.000,00 | 75,56 | 3.377.281.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%) | 28,89 | 46,67 | 64,44 | | 68,89 | | 71,11 | | 73,33 | | 75,56 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%) | - | 2,22 | 4,44 | | 6,67 | | 8,89 | | 11,11 | | 13,33 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 240.388.000,00 | | 382.600.000,00 | | 394.078.000,00 | | 405.901.000,00 | | 418.079.000,00 | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | 240.388.000,00 | | 382.600.000,00 | | 394.078.000,00 | | 405.901.000,00 | | 418.079.000,00 | |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%)) | 33,33 | 44,44 | 55,56 | 240.388.000,00 | 66,67 | 382.600.000,00 | 77,78 | 394.078.000,00 | 88,89 | 405.901.000,00 | 100 | 418.079.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 355.498.000,00 | | 366.163.000,00 | | 377.148.000,00 | | 388.463.000,00 | | 400.117.000,00 | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | 355.498.000,00 | | 366.163.000,00 | | 377.148.000,00 | | 388.463.000,00 | | 400.117.000,00 | |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) | 15,38 | 26,67 | 35,29 | 355.498.000,00 | 42,11 | 366.163.000,00 | 47,62 | 377.148.000,00 | 52,17 | 388.463.000,00 | 56 | 400.117.000,00 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 11940212000,00 | | 12433421000,00 | | 12806425000,00 | | 13190620000,00 | | 13586341000,00 | |

Tabel 4.1 menyajikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan program urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada periode tahun 2025–2030. Fokus utama tabel ini adalah pada urusan Statistik, Persandian, serta Komunikasi dan Informatika, yang menjadi pilar penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik.

1. Peningkatan Konektivitas dan Layanan Digital Pemerintahan

Pada bidang Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan terhadap persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah serta pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD).

Target kinerja menunjukkan tren peningkatan bertahap dari kondisi awal tahun 2024, dengan capaian yang direncanakan meningkat secara konsisten hingga tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi sistem, interoperabilitas layanan, serta efektivitas koordinasi antar PD.

2. Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, ditetapkan indikator outcome berupa persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar Sistem Statistik Nasional (SSN).

Target kinerja dirancang meningkat secara bertahap hingga mencapai 100 persen pada tahun 2030, yang menandakan terwujudnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi data sektoral secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, pagu indikatif anggaran dialokasikan secara berkelanjutan setiap tahun untuk menjamin kesinambungan program dan peningkatan kualitas tata kelola data daerah.

3. Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian

Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, fokus diarahkan pada peningkatan tingkat keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja menunjukkan peningkatan bertahap tingkat keamanan informasi pemerintah dari baseline tahun 2024 hingga target akhir tahun 2030.

Dukungan anggaran disediakan secara konsisten setiap tahun melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi aset informasi, data strategis, dan layanan digital pemerintahan dari berbagai risiko siber.

4. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika terdiri atas beberapa program utama, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator pencapaian IKU Perangkat Daerah yang ditargetkan tetap optimal (100 persen) setiap tahun.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik

pemerintah daerah. Target kinerja menunjukkan peningkatan berkelanjutan hingga tahun 2030.

- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi serta konektivitas PD terhadap akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

Seluruh program tersebut didukung oleh pagu indikatif anggaran yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun, mencerminkan kebutuhan pengembangan infrastruktur digital, layanan informasi publik, serta aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.

5. Gambaran Pendanaan Secara Keseluruhan

Secara total, tabel ini memperlihatkan adanya kenaikan pagu indikatif anggaran secara konsisten pada setiap tahun perencanaan. Hal ini menunjukkan arah kebijakan fiskal daerah yang responsif terhadap kebutuhan transformasi digital, penguatan data statistik, keamanan informasi, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi publik.

Rincian lengkap mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, indikator outcome, target tahunan, dan pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|--|---|---|--|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| 2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | |
| - Meningkatnya Daya Saing Pemuda | Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital | | | | Indeks Pemdi (Poin) | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital | | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Poin) | | |
| | | | | | Persentase layanan pemerintah yang terdigitalisasi (%) | | |
| | | | | | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | | | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase) | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | 2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | |
| | | | | | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan) | 2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | |
| | | | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik | |
| | | | | | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase) | 2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | | | | | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | |
| | | | | | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase) | 2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi | |
| | | | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik | |
| | | | | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen) | 2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | |
| | | | | | Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten | |
| | | | | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang) | 2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) | 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%) | 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |
| | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%) | 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | |
| | | | | Terlaksananya pengelolaan domain dan subdomain resmi perangkat daerah secara tertib dan terstandar | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | 2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | |
| | | | | Terselenggaranya tata kelola e-government yang berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|---|-------------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi) | 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | |
| | | | | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan) | 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen) | 2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | |
| | | | | | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | |
| | | | | | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan) | 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|---------------|--|---|---------------|--|---|-------------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi) | 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan | |
| | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) | 2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah) | 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet | |
| | | | | | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | |
| | | | | | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen) | 2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | |
| | | Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat dan Dapat Diandalkan | | | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) | | |
| | | | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | | Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%)) | 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | OPD yang melaksanakan layanan satu data | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan) | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%) | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | 2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | |
| | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | 2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | |
| | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | |
| | | | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) | 2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---|---|--|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%) | 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | |
| | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan) | 2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | | | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin) | | |
| | | | Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | | Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase) | 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | |
| | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | |
| | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | Terlaksananya manajemen administrasi keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |
| | | | | Terlaksananya manajemen administrasi umum | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | |
| | | | | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | Terlaksananya pemeliharaan BMD | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | Meningkatnya Keamanan Informasi | | | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%) | | |
| | | | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | | Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) | 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | |
| | | | | OPD yang diamankan | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen) | 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan) | 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | 2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan) | 2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | 2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen) | 2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | |
| | | | | Terselenggaranya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan) | 2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan) | 2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | |

Berdasarkan tabel program dan pagu indikatif, dalam upaya memastikan bahwa tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat tercapai secara efektif dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025–2029), Diskominfo merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terstruktur, lengkap dengan *output* dan *outcome*-nya sebagaimana tercantum dalam tabel pada bagian sebelumnya.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 mencakup:

- 4 (empat) program strategis yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan teknis dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan teknis, serta
- 1 (satu) program operasional (penunjang) dengan 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan penunjang.

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran langsung dari program dan menjadi instrumen operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Setiap kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *outcome* dan hasil pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 6 (enam) kegiatan teknis dan 6 (enam) kegiatan penunjang, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan: *Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - o Kegiatan: *Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.*
 - o Kegiatan: *Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.*
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - o Kegiatan: *Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.*
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - o Kegiatan: *Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.*
 - o Kegiatan: *Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.*
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - o Kegiatan: *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*
 - o Kegiatan: *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*
 - o Kegiatan: *Administrasi Umum Perangkat Daerah.*
 - o Kegiatan: *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*
 - o Kegiatan: *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*
 - o Kegiatan: *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*

c. Sub Kegiatan

Sub kegiatan merupakan penjabaran teknis yang lebih spesifik dari kegiatan dan berfungsi sebagai

pelaksanaan langsung di lapangan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja (*output*) yang terukur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan teknis dan 18 (delapan belas) sub kegiatan penunjang yang dilaksanakan secara bertahap selama periode Renstra 2025–2029.

Beberapa sub kegiatan utama meliputi:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Relasi Media
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - Diseminasi Informasi
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 - Penyusunan Konten
 - Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah dan Desa
 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)
 - Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- Koordinasi Pemanfaatan Portal Layanan Pemerintah Terintegrasi
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK
 - Koordinasi Pengembangan Aplikasi Khusus SPBE
 - Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)
 - Koordinasi Literasi dan Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
 - Penyediaan Akses Internet
 - Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE (Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis)
 - Koordinasi Penyelenggaraan Smart Regency
 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional
 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Statistik
 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
 - Koordinasi dan Kolaborasi Forum Satu Data Daerah
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian
 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan RKA/DPA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan (Gaji, Laporan Keuangan Bulanan & Tahunan)
 - Administrasi Umum dan Pengadaan Perlengkapan
 - Pengadaan Barang Milik Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan
 - Pemeliharaan Kendaraan dan Aset Operasional

Dengan demikian, keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut menjadi instrumen utama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital, memperkuat keamanan informasi, serta meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---|--------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 11.344.326.000,00 | | 11.684.658.000,00 | | 12.035.199.000,00 | | 12.396.256.000,00 | | 12.768.145.000,00 | | | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA | | | | 4.954.969.000,00 | | 5.103.619.000,00 | | 5.256.728.000,00 | | 5.414.430.000,00 | | 5.576.863.000,00 | | | |
| Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase) | 100 | 100 | 4.954.969.000,00 | 100 | 5.103.619.000,00 | 100 | 5.256.728.000,00 | 100 | 5.414.430.000,00 | 100 | 5.576.863.000,00 | 2.16.2.21.2.20. 17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 288.591.670,00 | | 288.591.670,00 | | 297.249.420,10 | | 306.166.902,71 | | 311.115.856,41 | | | |
| Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 288.591.670,00 | 1 | 288.591.670,00 | 1 | 297.249.420,10 | 1 | 306.166.902,71 | 1 | 311.115.856,41 | | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|--------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Daerah (Berita Acara) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | - | 160 | | 170 | | 180 | | 190 | | 200 | | | | | |
| 2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 47.395.730,00 | | 47.395.730,00 | | 48.817.601,90 | | 50.282.129,96 | | 51.790.593,86 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 47.395.730,00 | 1 | 47.395.730,00 | 1 | 48.817.601,90 | 1 | 50.282.129,96 | 1 | 51.790.593,86 | | | | |
| 2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 6.500.100,00 | | 6.500.100,00 | | 6.695.103,00 | | 6.895.956,09 | | 7.102.834,77 | | | Praya | |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 6.500.100,00 | 1 | 6.500.100,00 | 1 | 6.695.103,00 | 1 | 6.895.956,09 | 1 | 7.102.834,77 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 2.16.01.2.01.000 3 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 3.125.100,00 | | 3.125.100,00 | | 3.218.853,00 | | 3.315.418,59 | | 3.414.881,15 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 3.125.100,00 | 1 | 3.125.100,00 | 1 | 3.218.853,00 | 1 | 3.315.418,59 | 1 | 3.414.881,15 | | | |
| 2.16.01.2.01.000 4 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | 7.047.600,00 | | 7.047.600,00 | | 7.259.028,00 | | 7.476.798,84 | | 7.701.102,81 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 7.047.600,00 | 1 | 7.047.600,00 | 1 | 7.259.028,00 | 1 | 7.476.798,84 | 1 | 7.701.102,81 | | | |
| 2.16.01.2.01.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | 2.158.500,00 | | 2.158.500,00 | | 2.223.255,00 | | 2.289.952,65 | | 2.358.651,23 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 2.158.500,00 | 1 | 2.158.500,00 | 1 | 2.223.255,00 | 1 | 2.289.952,65 | 1 | 2.358.651,23 | | | |
| 2.16.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 17.183.120,00 | | 17.183.120,00 | | 17.698.613,60 | | 18.229.572,01 | | 18.776.459,17 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|---|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 17.183.120,00 | 12 | 17.183.120,00 | 12 | 17.698.613,60 | 12 | 18.229.572,01 | 12 | 18.776.459,17 | | | |
| 2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 48.790.300,00 | | 48.790.300,00 | | 50.254.009,00 | | 51.761.629,27 | | 53.314.478,15 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | 1 | 48.790.300,00 | 1 | 48.790.300,00 | 1 | 50.254.009,00 | 1 | 51.761.629,27 | 1 | 53.314.478,15 | | | |
| 2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 133.096.220,00 | | 133.096.220,00 | | 137.089.106,60 | | 141.201.779,80 | | 141.201.779,80 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | - | 160 | 133.096.220,00 | 170 | 133.096.220,00 | 180 | 137.089.106,60 | 190 | 141.201.779,80 | 200 | 141.201.779,80 | | | |
| 2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 23.295.000,00 | | 23.295.000,00 | | 23.993.850,00 | | 24.713.665,50 | | 25.455.075,47 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 1 | 1 | 23.295.000,00 | 1 | 23.295.000,00 | 1 | 23.993.850,00 | 1 | 24.713.665,50 | 1 | 25.455.075,47 | | | |
| 2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.946.379.259,00 | | 3.946.379.259,80 | | 4.064.821.097,63 | | 4.180.268.177,17 | | 4.281.136.495,92 | | | |
| Terlaksananya manajemen administrasi keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 3.946.379.259,00 | 12 | 3.946.379.259,80 | 12 | 4.064.821.097,63 | 12 | 4.180.268.177,17 | 12 | 4.281.136.495,92 | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | |
| 2.16.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3.933.879.159,00 | | 3.933.879.159,80 | | 4.051.945.994,63 | | 4.167.006.821,08 | | 4.267.477.299,15 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | 12 | 3.933.879.159,00 | 12 | 3.933.879.159,80 | 12 | 4.051.945.994,63 | 12 | 4.167.006.821,08 | 12 | 4.267.477.299,15 | | | |
| 2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 8.000.100,00 | | 8.000.100,00 | | 8.240.103,00 | | 8.487.306,09 | | 8.741.925,27 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 8.000.100,00 | 1 | 8.000.100,00 | 1 | 8.240.103,00 | 1 | 8.487.306,09 | 1 | 8.741.925,27 | | | |
| 2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | | 4.635.000,00 | | 4.774.050,00 | | 4.917.271,50 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | 12 | 4.500.000,00 | 12 | 4.500.000,00 | 12 | 4.635.000,00 | 12 | 4.774.050,00 | 12 | 4.917.271,50 | | | |
| 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 338.645.031,00 | | 339.602.998,00 | | 349.791.087,94 | | 354.903.139,41 | | 365.550.233,60 | | | |
| Terlaksananya manajemen administrasi umum | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | - | 12 | 338.645.031,00 | 12 | 339.602.998,00 | 12 | 349.791.087,94 | 12 | 354.903.139,41 | 12 | 365.550.233,60 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Konsultasi SKPD (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | | |
| 2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 164.480.592,00 | | 165.438.559,00 | | 170.401.715,77 | | 175.513.767,24 | | 180.779.180,26 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | 12 | 164.480.592,00 | 12 | 165.438.559,00 | 12 | 170.401.715,77 | 12 | 175.513.767,24 | 12 | 180.779.180,26 | | | | |
| 2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 174.164.439,00 | | 174.164.439,00 | | 179.389.372,17 | | 179.389.372,17 | | 184.771.053,34 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | - | 12 | 174.164.439,00 | 12 | 174.164.439,00 | 12 | 179.389.372,17 | 12 | 179.389.372,17 | 12 | 184.771.053,34 | | | | |
| 2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 157.360.000,00 | | 304.000.000,00 | | 315.000.000,00 | | 340.000.000,00 | | 380.000.000,00 | | | | |
| Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | - | 2 | 157.360.000,00 | 2 | 304.000.000,00 | 2 | 315.000.000,00 | 2 | 340.000.000,00 | 2 | 380.000.000,00 | | | | |
| | Jumlah Paket Mebel yang | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Disediakan (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 157.360.000,00 | | 254.000.000,00 | | 263.000.000,00 | | 280.000.000,00 | | 300.000.000,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | - | 2 | 157.360.000,00 | 2 | 254.000.000,00 | 2 | 263.000.000,00 | 2 | 280.000.000,00 | 2 | 300.000.000,00 | | | | |
| 2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | 0,00 | | 50.000.000,00 | | 52.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 52.000.000,00 | 1 | 60.000.000,00 | 1 | 80.000.000,00 | | | | |
| 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 105.203.220,00 | | 106.255.252,20 | | 107.512.879,72 | | 110.738.266,11 | | 114.060.414,10 | | | | |
| Terlaksananya penyediaan jasa penunjang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 105.203.220,00 | 12 | 106.255.252,20 | 12 | 107.512.879,72 | 12 | 110.738.266,11 | | 114.060.414,10 | | | | |
| 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 105.203.220,00 | | 106.255.252,20 | | 107.512.879,72 | | 110.738.266,11 | | 114.060.414,10 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 105.203.220,00 | 12 | 106.255.252,20 | 12 | 107.512.879,72 | 12 | 110.738.266,11 | | 114.060.414,10 | | | | |
| 2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | | | | 118.789.820,00 | | 118.789.820,00 | | 122.353.514,61 | | 122.353.514,60 | | 124.999.999,97 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|--------------------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pemeliharaan BMD | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7 | 7 | 118.789.820,00 | 7 | 118.789.820,00 | 7 | 122.353.514,61 | 7 | 122.353.514,60 | 7 | 124.999.999,97 | | | | |
| 2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 118.789.820,00 | | 118.789.820,00 | | 122.353.514,61 | | 122.353.514,60 | | 124.999.999,97 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7 | 7 | 118.789.820,00 | 7 | 118.789.820,00 | 7 | 122.353.514,61 | 7 | 122.353.514,60 | 7 | 124.999.999,97 | | | | |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 3.388.689.000,00 | | 3.490.350.000,00 | | 3.595.061.000,00 | | 3.702.913.000,00 | | 3.814.001.000,00 | | | | |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 41,70 | 49,80 | 3.388.689.000,00 | 53,85 | 3.490.350.000,00 | 57,89 | 3.595.061.000,00 | 61,94 | 3.702.913.000,00 | 65,99 | 3.814.001.000,00 | 2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.388.689.000,00 | | 3.490.350.000,00 | | 3.595.061.000,00 | | 3.702.913.000,00 | | 3.814.001.000,00 | | | |
| Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) | Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | - | 120 | 3.388.689.000,00 | 120 | 3.490.350.000,00 | 120 | 3.595.061.000,00 | 120 | 3.702.913.000,00 | 120 | 3.814.001.000,00 | | | |
| | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | - | 65 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | | | |
| | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang) | - | 138 | | 138 | | 138 | | 138 | | 138 | | | | |
| | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 10 | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|--------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | |
| | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 55 | 55 | | 58 | | 58 | | 58 | | 60 | | | | | |
| | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | |
| | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | |
| | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen) | 22 | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase) | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | |
| | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase) | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | |
| 2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media | | | | 1.498.258.451,20 | | 1.299.102.000,00 | | 1.212.495.200,00 | | 1.212.495.200,00 | | 1.299.102.000,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | - | 65 | 1.498.258.451,20 | 65 | 1.299.102.000,00 | 70 | 1.212.495.200,00 | 75 | 1.212.495.200,00 | 80 | 1.299.102.000,00 | | | | |
| 2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | 126.000.000,00 | | 138.600.000,00 | | 152.460.000,00 | | 160.083.000,00 | | 168.087.150,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 10 | 15 | 126.000.000,00 | 20 | 138.600.000,00 | 25 | 152.460.000,00 | 30 | 160.083.000,00 | 35 | 168.087.150,00 | | | | |
| 2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi | | | | 17.935.809,10 | | 19.729.390,01 | | 21.702.329,01 | | 22.787.445,46 | | 23.926.817,73 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan) | 5 | 5 | 17.935.809,10 | 5 | 19.729.390,01 | 5 | 21.702.329,01 | 5 | 22.787.445,46 | 5 | 23.926.817,73 | | | | |
| 2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik | | | | 455.748.000,00 | | 501.322.800,00 | | 541.428.624,00 | | 568.500.055,20 | | 596.925.057,96 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 100,0 | 100,0 | 455.748.000,00 | 100,0 | 501.322.800,00 | 100,0 | 541.428.624,00 | 100,0 | 568.500.055,20 | 100,0 | 596.925.057,96 | | | | |
| 2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | | 13.569.472,00 | | 14.926.419,20 | | 16.419.061,12 | | 17.240.014,18 | | 18.102.014,88 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase) | 100,0 | 100,0 | 13.569.472,00 | 100,0 | 14.926.419,20 | 100,0 | 16.419.061,12 | 100,0 | 17.240.014,18 | 100,0 | 18.102.014,88 | | | | |
| 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | 16.000.000,00 | | 17.600.000,00 | | 19.360.000,00 | | 20.328.000,00 | | 21.344.400,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|--|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 100,0 | 100,0 | 16.000.000,00 | 100,0 | 17.600.000,00 | 100,0 | 19.360.000,00 | 100,0 | 20.328.000,00 | 100,0 | 21.344.400,00 | | | |
| 2.16.02.2.01.002 0 - Diseminasi Informasi | | | | 408.089.878,50 | | 448.898.866,35 | | 493.788.752,99 | | 518.478.190,63 | | 544.402.100,17 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase) | 100,0 | 100,0 | 408.089.878,50 | 100,0 | 448.898.866,35 | 100,0 | 493.788.752,99 | 100,0 | 518.478.190,63 | 100,0 | 544.402.100,17 | | | |
| 2.16.02.2.01.002 1 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | 353.677.894,70 | | 500.820.080,49 | | 533.121.544,54 | | 518.287.057,35 | | 410.926.018,36 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 55 | 55 | 353.677.894,70 | 58 | 500.820.080,49 | 58 | 533.121.544,54 | 58 | 518.287.057,35 | 60 | 410.926.018,36 | | | |
| 2.16.02.2.01.002 2 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | | 19.080.000,00 | | 20.988.000,00 | | 23.086.800,00 | | 25.395.480,00 | | 27.935.028,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen) | 22 | 22 | 19.080.000,00 | 22 | 20.988.000,00 | 22 | 23.086.800,00 | 22 | 25.395.480,00 | 22 | 27.935.028,00 | | | |
| 2.16.02.2.01.002 3 - Penyusunan Konten | | | | 148.500.000,00 | | 163.350.000,00 | | 179.685.000,00 | | 197.653.500,00 | | 217.418.850,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | - | 120 | 148.500.000,00 | 120 | 163.350.000,00 | 120 | 179.685.000,00 | 120 | 197.653.500,00 | 120 | 217.418.850,00 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 2.16.02.2.01.002 4 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | 331.829.494,50 | | 365.012.443,95 | | 401.513.688,34 | | 441.665.057,18 | | 485.831.562,90 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang) | - | 138 | 331.829.494,50 | 138 | 365.012.443,95 | 138 | 401.513.688,34 | 138 | 441.665.057,18 | 138 | 485.831.562,90 | | | |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | 3.000.668.000,00 | | 3.090.689.000,00 | | 3.183.410.000,00 | | 3.278.913.000,00 | | 3.377.281.000,00 | | | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) | 28,89 | 64,44 | 3.000.668.000,00 | 68,89 | 3.090.689.000,00 | 71,11 | 3.183.410.000,00 | 73,33 | 3.278.913.000,00 | 75,56 | 3.377.281.000,00 | 2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%) | 28,89 | 64,44 | | 68,89 | | 71,11 | | 73,33 | | 75,56 | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%) | - | 4,44 | | 6,67 | | 8,89 | | 11,11 | | 13,33 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 55.000.000,00 | 60.000.000,00 | 65.000.000,00 | 70.000.000,00 | 75.000.000,00 | | | | | | | |
| Terlaksananya pengelolaan domain dan subdomain resmi perangkat daerah secara tertib dan terstandar | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | - | 3 | 55.000.000,00 | 3 | 60.000.000,00 | 3 | 65.000.000,00 | 3 | 70.000.000,00 | 3 | 75.000.000,00 | | | |
| 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | 55.000.000,00 | 60.000.000,00 | 65.000.000,00 | 70.000.000,00 | 75.000.000,00 | | | | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | - | 3 | 55.000.000,00 | 3 | 60.000.000,00 | 3 | 65.000.000,00 | 3 | 70.000.000,00 | 3 | 75.000.000,00 | | | |
| 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.945.668.000,00 | 3.030.689.000,00 | 3.118.410.000,00 | 3.208.913.000,00 | 3.302.281.000,00 | | | | | | | |
| Terselenggaranya tata kelola e-government | Jumlah laporan operasionalisasi | 1 | 1 | 2.945.668.000,00 | 5 | 3.030.689.000,00 | 6 | 3.118.410.000,00 | 6 | 3.208.913.000,00 | 6 | 3.302.281.000,00 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|--------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| yang berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah | pusat kendali (Laporan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | 134 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | |
| | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi) | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi) | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|--------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Dinas Kominfo (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | - | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | |
| | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) | - | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | |
| | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | - | 8 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | | | 25.000.000,00 | | 27.500.000,00 | | 30.250.000,00 | | 33.275.000,00 | | 36.602.500,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi) | - | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 27.500.000,00 | 1 | 30.250.000,00 | 1 | 33.275.000,00 | 1 | 36.602.500,00 | | | | |
| 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | | 650.000.000,00 | | 715.000.000,00 | | 786.500.000,00 | | 836.500.000,00 | | 886.500.000,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|--|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | - | 5 | 650.000.000,00 | 5 | 715.000.000,00 | 5 | 786.500.000,00 | 5 | 836.500.000,00 | 5 | 886.500.000,00 | | | |
| 2.16.03.2.02.002 4 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | 1.400.000.000,00 | | 1.500.000.000,00 | | 1.550.000.000,00 | | 1.600.000.000,00 | | 1.650.000.000,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | - | 8 | 1.400.000.000,00 | 2 | 1.500.000.000,00 | 1 | 1.550.000.000,00 | 1 | 1.600.000.000,00 | 1 | 1.650.000.000,00 | | | |
| 2.16.03.2.02.002 5 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | | 15.000.000,00 | | 16.500.000,00 | | 18.150.000,00 | | 19.965.000,00 | | 21.961.500,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan) | - | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 16.500.000,00 | 1 | 18.150.000,00 | 1 | 19.965.000,00 | 1 | 21.961.500,00 | | | |
| 2.16.03.2.02.002 6 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| kewenangan Dinas Kominfo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen) | - | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | | | | |
| 2.16.03.2.02.003 2 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | | 150.000.000,00 | | 172.500.000,00 | | 198.375.000,00 | | 228.131.250,00 | | 262.350.938,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | 134 | 3 | 150.000.000,00 | 3 | 172.500.000,00 | 3 | 198.375.000,00 | 3 | 228.131.250,00 | 3 | 262.350.938,00 | | | | |
| 2.16.03.2.02.003 3 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | | 495.668.000,00 | | 374.189.000,00 | | 294.635.000,00 | | 236.991.750,00 | | 176.661.062,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan) | 1 | 1 | 495.668.000,00 | 5 | 374.189.000,00 | 6 | 294.635.000,00 | 6 | 236.991.750,00 | 6 | 176.661.062,00 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|--------------------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan | | | | 50.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | 60.500.000,00 | | 66.550.000,00 | | 73.205.000,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi) | - | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 55.000.000,00 | 1 | 60.500.000,00 | 1 | 66.550.000,00 | 1 | 73.205.000,00 | | | | |
| 2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) | - | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | | | | |
| 2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | (Perangkat Daerah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.003 7 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | | 110.000.000,00 | | 110.000.000,00 | | 120.000.000,00 | | 125.000.000,00 | | 130.000.000,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | 8 | 8 | 110.000.000,00 | 8 | 110.000.000,00 | 8 | 120.000.000,00 | 8 | 125.000.000,00 | 8 | 130.000.000,00 | | | | |
| 2.16.03.2.02.003 8 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | 50.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | | 62.500.000,00 | | 65.000.000,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 1 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 60.000.000,00 | 1 | 60.000.000,00 | 1 | 62.500.000,00 | 1 | 65.000.000,00 | | | | |
| 2.16.03.2.02.003 9 - Koordinasi Pengelolaan | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | | | | |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | 240.388.000,00 | | 382.600.000,00 | | 394.078.000,00 | | 405.901.000,00 | | 418.079.000,00 | | | | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 240.388.000,00 | | 382.600.000,00 | | 394.078.000,00 | | 405.901.000,00 | | 418.079.000,00 | | | | |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. ((%)) | 33,33 | 55,56 | 240.388.000,00 | 66,67 | 382.600.000,00 | 77,78 | 394.078.000,00 | 88,89 | 405.901.000,00 | 100 | 418.079.000,00 | 2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | 240.388.000,00 | | 382.600.000,00 | | 394.078.000,00 | | 405.901.000,00 | | 418.079.000,00 | | | | |
| OPD yang melaksanakan layanan satu data | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | - | 0,80 | 240.388.000,00 | 0,85 | 382.600.000,00 | 0,90 | 394.078.000,00 | 0,95 | 405.901.000,00 | 1,00 | 418.079.000,00 | | | | |
| | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%) | - | 0,80 | | 0,85 | | 0,90 | | 0,95 | | 1,00 | | | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | - | 0,80 | | 0,85 | | 0,90 | | 0,95 | | 1,00 | | | | |
| | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | - | 0,56 | | 0,67 | | 0,78 | | 0,89 | | 1,00 | | | | |
| | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan) | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) | 40 | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | | | |
| 2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | | | 10.800.000,00 | | 17.280.320,00 | | 17.798.729,60 | | 18.332.691,48 | | 18.882.672,23 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | - | 0,56 | 10.800.000,00 | 0,67 | 17.280.320,00 | 0,78 | 17.798.729,60 | 0,89 | 18.332.691,48 | 1,00 | 18.882.672,23 | | | |
| 2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | 69.138.826,00 | | 110.622.121,60 | | 113.940.785,25 | | 117.358.348,80 | | 120.879.099,26 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | - | 0,80 | 69.138.826,00 | 0,85 | 110.622.121,60 | 0,90 | 113.940.785,25 | 0,95 | 117.358.348,80 | 1,00 | 120.879.099,26 | | | |
| 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | | | 78.657.174,00 | | 124.910.358,40 | | 128.657.669,15 | | 132.517.399,23 | | 136.492.921,20 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | - | 0,80 | 78.657.174,00 | 0,85 | 124.910.358,40 | 0,90 | 128.657.669,15 | 0,95 | 132.517.399,23 | 1,00 | 136.492.921,20 | | | |
| 2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | 36.540.000,00 | | 58.464.000,00 | | 60.217.920,00 | | 62.024.457,60 | | 63.885.191,33 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) | 40 | 45 | 36.540.000,00 | 45 | 58.464.000,00 | 45 | 60.217.920,00 | 45 | 62.024.457,60 | 45 | 63.885.191,33 | | | |
| 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | | 34.452.000,00 | | 55.123.200,00 | | 56.776.896,00 | | 58.480.202,88 | | 60.234.608,97 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%) | - | 0,80 | 34.452.000,00 | 0,85 | 55.123.200,00 | 0,90 | 56.776.896,00 | 0,95 | 58.480.202,88 | 1,00 | 60.234.608,97 | | | |
| 2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | 10.800.000,00 | | 16.200.000,00 | | 16.686.000,00 | | 17.187.900,01 | | 17.704.507,01 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|--|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan) | - | 1 | 10.800.000,00 | 1 | 16.200.000,00 | 1 | 16.686.000,00 | 1 | 17.187.900,01 | 1 | 17.704.507,01 | | | |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 355.498.000,00 | | 366.163.000,00 | | 377.148.000,00 | | 388.463.000,00 | | 400.117.000,00 | | | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 355.498.000,00 | | 366.163.000,00 | | 377.148.000,00 | | 388.463.000,00 | | 400.117.000,00 | | | |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) | 15,38 | 35,29 | 355.498.000,00 | 42,11 | 366.163.000,00 | 47,62 | 377.148.000,00 | 52,17 | 388.463.000,00 | 56 | 400.117.000,00 | 2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 320.498.000,00 | | 328.879.000,00 | | 337.466.900,00 | | 347.813.790,00 | | 355.595.169,00 | | | |
| OPD yang diamankan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan) | - | 1 | 320.498.000,00 | 1 | 328.879.000,00 | 1 | 337.466.900,00 | 1 | 347.813.790,00 | 1 | 355.595.169,00 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | - | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | |
| | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | - | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | |
| 2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 131.694.000,00 | | 131.694.000,00 | | 134.863.400,00 | | 137.349.740,00 | | 136.084.714,00 | | | KAB. LOMBOK TENGAH | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|--|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | - | 2 | 131.694.000,00 | 2 | 131.694.000,00 | 2 | 134.863.400,00 | 2 | 137.349.740,00 | 2 | 136.084.714,00 | | | |
| 2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | | | 90.000.000,00 | | 93.500.600,00 | | 97.550.660,00 | | 99.305.726,00 | | 104.236.298,60 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan) | - | 1 | 90.000.000,00 | 1 | 93.500.600,00 | 1 | 97.550.660,00 | 1 | 99.305.726,00 | 1 | 104.236.298,60 | | | |
| 2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | 60.500.000,00 | | 61.550.000,00 | | 62.705.000,00 | | 64.975.500,00 | | 66.473.050,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | |
| Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | - | 3 | 60.500.000,00 | 3 | 61.550.000,00 | 3 | 62.705.000,00 | 3 | 64.975.500,00 | 3 | 66.473.050,00 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|---------------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | 38.304.000,00 | | 42.134.400,00 | | 42.347.840,00 | | 46.182.824,00 | | 48.801.106,40 | | KAB. LOMBOK TENGAH, Praya | |
| Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen) | 2 | 2 | 38.304.000,00 | 2 | 42.134.400,00 | 2 | 42.347.840,00 | 2 | 46.182.824,00 | 2 | 48.801.106,40 | | | |
| 2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 35.000.000,00 | | 37.284.000,00 | | 39.681.100,00 | | 40.649.210,00 | | 44.521.831,00 | | | |
| Terselenggaranya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi | - | - | 35.000.000,00 | 1 | 37.284.000,00 | 1 | 39.681.100,00 | 1 | 40.649.210,00 | 1 | 44.521.831,00 | | | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH | LOKASI | KET | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|--------------------|------|--|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | | | | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.02.2.02.000 2 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | 35.000.000,00 | | 37.284.000,00 | | 39.681.100,00 | | 40.649.210,00 | | 44.521.831,00 | | KAB. LOMBOK TENGAH | | |
| Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan) | - | - | 35.000.000,00 | 1 | 37.284.000,00 | 1 | 39.681.100,00 | 1 | 40.649.210,00 | 1 | 44.521.831,00 | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah dirancang secara komprehensif untuk mendukung transformasi digital pemerintahan daerah. Setiap program diarahkan untuk memperkuat pengelolaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik, memperkuat keamanan siber dan persandian, serta memastikan penyelenggaraan statistik sektoral yang akurat dan terintegrasi.

Rencana kegiatan dan subkegiatan juga mencerminkan komitmen Diskominfo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis data. Pendanaan dialokasikan secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan program strategis dan kegiatan penunjang, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur TIK, literasi digital aparatur, penguatan sistem keamanan informasi, serta optimalisasi layanan publik digital.

Secara keseluruhan, rencana program dan pendanaan tahun 2025–2029 menunjukkan arah kebijakan yang konsisten terhadap pencapaian visi “Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital,” sekaligus memperkuat daya saing dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah.

d. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan merupakan komponen teknis pelaksanaan kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja program

strategis perangkat daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, setiap sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Sub kegiatan yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja internal dinas, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem transformasi digital, keterbukaan informasi publik, tata kelola data statistik sektoral, serta keamanan siber dan persandian yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah yang adaptif dan berdaya saing.

Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan program prioritas RPJMD, khususnya dalam mendukung misi:

- Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, mudah, tepat waktu, dan terjangkau; serta
- Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui transformasi digital pemerintahan.

Setiap sub kegiatan juga diarahkan untuk memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan kualitas layanan publik digital, efisiensi tata kelola pemerintahan, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Adapun Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029 dapat dijabarkan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan
Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|--|---|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| 2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |
| 1. | 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media 2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik 2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi 2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten 2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | |
| 2. | 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | 2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|------|--|---|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| | | | 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | |
| | | | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | |
| | | | 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | |
| | | | 2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | |
| | | | 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | |
| | | | 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan | |
| | | | 2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | |
| | | | 2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | |
| 3. | 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | |
| | | | 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | |
| | | | 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |
| 4. | 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | |
| | | | 2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | |
| | | | 2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | |
| | | | 2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | |



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah melalui tiga rumpun utama, yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika dan SPBE, serta penyelenggaraan statistik sektoral dan keamanan informasi.

Pada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, fokus utama diarahkan pada peningkatan jangkauan, kualitas, dan efektivitas komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, relasi media, kemitraan dengan komunitas informasi masyarakat, pelayanan informasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, diseminasi informasi, pengelolaan media komunikasi publik, penyusunan strategi komunikasi publik, penguatan konten informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik. Keseluruhan kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan secara tepat, akurat, dan berkelanjutan.

Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola aplikasi dan layanan digital pemerintahan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengelolaan nama domain dan subdomain pemerintah daerah dan desa, pengelolaan e-government, koordinasi manajemen SPBE, penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah,

koordinasi pemanfaatan portal layanan terintegrasi, pengembangan aplikasi khusus sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE, penyelenggaraan sistem penghubung layanan untuk interoperabilitas data, penyusunan kebijakan tata kelola SPBE, serta fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota cerdas. Program ini mendukung terwujudnya transformasi digital pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selanjutnya, pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sasaran yang ingin dicapai adalah terbangunnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi penyelenggaraan statistik sesuai dengan Sistem Statistik Nasional (SSN). Kegiatan utama meliputi pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas statistik sektoral, pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar, serta penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah. Program ini menjadi fondasi penting bagi pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, tabel juga menggambarkan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang bertujuan meningkatkan keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan persandian, pelaksanaan keamanan informasi berbasis elektronik dan non-elektronik, pengelolaan sumber daya keamanan informasi berdasarkan analisis kebutuhan, penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian, serta penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi

dan persandian. Program ini mendukung terjaminnya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintahan.

Secara garis besar, keseluruhan program dan kegiatan dalam tabel tersebut saling terintegrasi dan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin keamanan informasi, serta mendukung pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di daerah. IKU tersebut dirancang untuk menggambarkan capaian kinerja strategis perangkat daerah secara terukur, progresif, dan berkelanjutan, dengan baseline tahun 2024 serta target tahunan hingga tahun 2029.

IKU berfungsi sebagai alat ukur strategis untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan “Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital”, yang dijabarkan ke dalam empat sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital;
2. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;

3. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah; dan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Capaian sasaran tersebut diukur melalui sejumlah IKU utama, antara lain Indeks Pemdi, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), persentase layanan pemerintahan yang terdigitalisasi, serta Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Seluruh indikator tersebut menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan digital, transparansi informasi, keamanan sistem informasi, serta penguatan budaya kerja berbasis data.

Secara kuantitatif, target IKU pada periode 2025–2029 menunjukkan peningkatan bertahap dan terukur, antara lain melalui peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari 90 poin pada tahun 2025 menjadi 92 poin pada tahun 2029, peningkatan persentase layanan pemerintahan yang terdigitalisasi dari 45,75 persen menjadi 53,85 persen, peningkatan nilai implementasi SAKIP dari 76,77 poin menjadi 83,89 poin, serta peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari 2,8 menjadi 3,2. Selain itu, Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah juga ditargetkan meningkat signifikan sebagai respons atas kebutuhan penguatan keamanan siber seiring meningkatnya digitalisasi layanan publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan merupakan ukuran hasil (outcome) yang mencerminkan kinerja nyata Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. IKU tersebut ditetapkan untuk:

- Mengukur pencapaian hasil akhir (outcome) strategis, bukan sekadar keluaran (output) program dan kegiatan;
- Menjamin keterpaduan arah kebijakan antara tujuan nasional SPBE, visi daerah MASMIRAH, serta strategi transformasi digital pelayanan publik di tingkat kabupaten;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta acuan penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SAKIP); dan
- Mendorong inovasi, peningkatan kualitas layanan publik digital, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan data (evidence-based management).

Untuk uraian lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta baseline dan target tahunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|------|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) |
| 1. | 2.16.2.21.2.20.17.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | |
| 2. | Indeks Pemdi | Poin | - | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | |
| 3. | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Poin | 87,68 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | |
| 4. | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | % | 13,51 | 13,62 | 16,34 | 19,06 | 21,79 | 24,51 | 27,23 | |
| 5. | Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Poin | 64,83 | 76,77 | 80,01 | 81,30 | 82,60 | 83,89 | 85,18 | |
| 6. | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Poin | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | |
| 7. | Persentase layanan pemerintah yang terdigitalisasi | % | 41,70 | 45,75 | 47,77 | 49,80 | 51,82 | 53,85 | 55,87 | |
| 8. | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) | Indeks | 45,97 | 46,32 | 46,67 | 47,02 | 47,36 | 47,71 | 48,06 | |

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, Indikator Kinerja Utama (IKU) Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menggambarkan arah peningkatan kinerja perangkat daerah secara bertahap dan berkelanjutan pada periode tahun 2025–2030 dengan baseline tahun 2024 sebagai titik awal pengukuran. Indikator-indikator yang disajikan mencerminkan peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendorong keterbukaan informasi publik, transformasi digital pemerintahan, penguatan tata kelola kinerja, keamanan informasi, serta pembangunan statistik sektoral.

Secara umum, seluruh indikator menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Indeks Pemdi ditargetkan meningkat progresif mulai tahun 2025 hingga 2030 sebagai cerminan penguatan kinerja pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika. Indeks Keterbukaan Informasi Publik juga ditargetkan terus naik dari baseline 87,68 poin pada tahun 2024 hingga mencapai 92,5 poin pada tahun 2030, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akses informasi kepada masyarakat.

Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah direncanakan mengalami peningkatan signifikan, dari kondisi awal 13,51 persen pada tahun 2024 menjadi 27,23 persen pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan penguatan sistem keamanan informasi seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan pemerintahan. Sejalan dengan itu, nilai implementasi

SAKIP perangkat daerah juga ditargetkan meningkat secara bertahap dari 64,83 poin menjadi 85,18 poin pada akhir periode renstra, yang menunjukkan perbaikan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Pada aspek pembangunan statistik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ditargetkan meningkat dari nilai 2,8 pada tahun 2024 menjadi 3,5 pada tahun 2030, yang menandakan penguatan tata kelola data dan statistik sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data. Persentase layanan pemerintahan yang terdigitalisasi juga direncanakan terus meningkat, dari 41,70 persen pada tahun 2024 menjadi 55,87 persen pada tahun 2030, sebagai wujud percepatan transformasi digital layanan publik.

Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) menunjukkan peningkatan bertahap dari 45,97 pada tahun 2024 menjadi 48,06 pada tahun 2030, yang mencerminkan peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, aman, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan publik digital secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama ini juga selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, khususnya mendukung *Misi ke-2: Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik* dan *Misi ke-3:*

Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.

3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKK merupakan indikator hasil (outcome indicators) yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai alat ukur utama untuk:

1. Menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika secara terukur, obyektif, dan akuntabel;
2. Menghubungkan capaian hasil (outcome) urusan dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra PD;
3. Menjadi dasar evaluasi dan pembinaan kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo, sesuai dengan Permendagri tentang Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
4. Mendorong konsistensi antarindikator, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, agar penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika berjalan sinkron dan terarah;

5. Meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*) di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan keamanan informasi.

Rincian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|------|--|-----------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | |
| 2. | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | komulatif | % | 28,89 | 46,67 | 64,44 | 68,89 | 71,11 | 73,33 | 75,56 | |
| 3. | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | komulatif | % | 28,89 | 46,67 | 64,44 | 68,89 | 71,11 | 73,33 | 75,56 | |
| 4. | Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) | komulatif | % | - | 2,22 | 4,44 | 6,67 | 8,89 | 11,11 | 13,33 | |
| 5. | 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | |
| 6. | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | positif | Poin | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | |
| 7. | 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 8. | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | positif | % | 13,51 | 13,62 | 16,34 | 19,06 | 21,79 | 24,51 | 27,23 | |

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat digambarkan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah periode 2025–2030 pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian menunjukkan arah pembangunan yang progresif, terukur, dan berkelanjutan.

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, fokus utama diarahkan pada peningkatan konektivitas dan integrasi layanan digital antar Perangkat Daerah (PD). Hal ini tercermin dari indikator persentase PD dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Dengan baseline tahun 2024 sebesar 28,89 persen, target capaian meningkat secara kumulatif hingga mencapai 75,56 persen pada tahun 2030. Pola peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas pemerataan akses internet sebagai fondasi utama transformasi digital pemerintahan.

Selaras dengan indikator tersebut, persentase PD di tingkat kabupaten/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah juga menunjukkan target capaian yang identik, dimulai dari baseline 28,89 persen dan meningkat secara bertahap hingga 75,56 persen pada akhir periode Renstra. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur jaringan internal pemerintahan menjadi prioritas strategis untuk mendukung efisiensi, integrasi data, dan percepatan layanan berbasis elektronik.

Selain itu, pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) ditargetkan meningkat secara konsisten meskipun belum memiliki baseline pada tahun 2024. Target pemanfaatan SPLPD dimulai dari 2,22

persen pada tahun 2025 dan meningkat secara kumulatif hingga mencapai 13,33 persen pada tahun 2030. Capaian ini mencerminkan tahapan adopsi sistem integrasi layanan yang direncanakan secara gradual sesuai dengan kesiapan perangkat daerah.

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan satuan poin dan bersifat positif. Nilai IPS pada baseline 2024 sebesar 2,8 dipertahankan pada tahun 2025, kemudian meningkat menjadi 3,0 pada periode 2026–2027, naik kembali menjadi 3,2 pada periode 2028–2029, dan ditargetkan mencapai 3,5 pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan upaya sistematis dalam memperkuat tata kelola statistik sektoral, kualitas data, serta pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah.

Sementara itu, pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, indikator Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Dengan baseline sebesar 13,51 persen pada tahun 2024, target capaian meningkat secara bertahap hingga mencapai 27,23 persen pada tahun 2030. Hal ini menegaskan bahwa aspek keamanan informasi menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sistem elektronik dan pertukaran data digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Secara keseluruhan, Tabel 4.6 menggambarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur digital, integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kualitas statistik, serta penguatan keamanan informasi.

Seluruh indikator disusun secara realistis dengan pola peningkatan bertahap, mencerminkan kesinambungan perencanaan dan keselarasan dengan upaya transformasi digital pemerintahan daerah.

Selanjutnya, metode pengukuran dan formulasi perhitungan dari masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7

Metode Pengukuran atau Formulasi Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

| NO | BIDANG | URAIAN | | FORMULASI |
|----|--------------------------|-------------------|---|---|
| 1 | PIKP | Indikator Sasaran | <i>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</i> | <i>Berdasarkan Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah</i> |
| 2 | APLIKASI DAN INFORMATIKA | Indikator Sasaran | <i>Persentase layanan pemerintah yang terdigitalisasi</i> | $\frac{\text{Jumlah Layanan Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\%$ |
| | | Indikator Sasaran | <i>Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)</i> | <i>Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital RI (KOMDIGI)</i> |

| NO | BIDANG | URAIAN | | FORMULASI |
|----|--------|--------------------------|--|--|
| | | Indikator Program | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | <p>Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah}} \times 100\%$</p> |
| | | Indikator Program | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | <p>Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota}} \times 100\%$</p> |
| | | Indikator Program | <i>Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)</i> | <p>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD}}{\text{Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Jumlah Aplikasi yang memanfaatkan SPLPD</p> |
| | | | | |

| NO | BIDANG | URAIAN | | FORMULASI |
|----|---|-------------------|--|---|
| 3 | PERSANDIAN, KEAMANAN INFORMASI DAN STATISTIK | Indikator Sasaran | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | $IPS = \frac{28}{100} \times \text{Nilai Hasil Penilaian Domain I} +$ $\frac{24}{100} \times \text{Nilai Hasil Penilaian Domain II} +$ $\frac{19}{100} \times \text{Nilai Hasil Penilaian Domain III} +$ $\frac{17}{100} \times \text{Nilai Hasil Penilaian Domain IV} +$ $\frac{12}{100} \times \text{Nilai Hasil Penilaian Domain V}$ |
| | | Indikator Program | Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah Dokumen Metadata}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ |
| | | Indikator Sasaran | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | $\frac{\text{Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi}}{\text{Nilai Optimal Indeks KAMI (918)}} \times 100\%$ |
| | | Indikator Program | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persentase nilai total area keamanan informasi dengan jumlah area penilaian yang ada, lalu dikalikan 100% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki metode pengukuran dan formulasi yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan nasional, baik yang mengacu pada Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maupun Badan Pusat Statistik (BPS).

Masing-masing indikator dirancang untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik sektoral, dengan pendekatan berbasis data, sistem elektronik, dan tata kelola pemerintahan digital.

Secara umum, indikator-indikator tersebut mencerminkan kinerja pada lima aspek utama pembangunan digital daerah, yaitu:

1. Transformasi Digital Pemerintahan, yang diukur melalui Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) dan Persentase Layanan Pemerintahan yang Terdigitalisasi;
2. Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik, yang diukur melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP);
3. Peningkatan Literasi dan Partisipasi Digital Masyarakat, melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI);
4. Integrasi dan Tata Kelola Data Statistik Sektoral, melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS);
5. Keamanan Siber dan Tata Kelola Informasi Pemerintah Daerah, melalui Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi (Indeks KAMI).

Selain itu, terdapat indikator tambahan yang menilai dukungan infrastruktur dan interoperabilitas digital antar-perangkat daerah, seperti:

- Persentase PD Terhubung Akses Internet Dinas Kominfo,
- Persentase PD Terhubung Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Intranet Pemda), dan
- Persentase PD yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD).

Kombinasi seluruh indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kematangan digital (digital maturity) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, keamanan, maupun pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Dengan metode pengukuran yang telah distandardisasi tersebut, diharapkan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja SPBE dan transformasi digital daerah dapat dilaksanakan secara lebih objektif, konsisten, dan terukur setiap tahunnya dalam periode Renstra 2025–2029.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah*.

Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik sektoral, dan bidang persandian dan keamanan informasi, yang diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2025–2029, yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (MASMIRAH)”

Renstra ini juga disusun sejalan dengan arah kebijakan nasional transformasi digital sebagaimana tercantum dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*;
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang *Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional*;
- serta inisiatif GovTech Indonesia (INA Digital) dan Kebijakan SPBE Terintegrasi Tahun 2025–2029 yang menjadi panduan pelaksanaan pemerintahan digital di tingkat pusat dan daerah.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi arah kebijakan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya harmonisasi kebijakan digital nasional, untuk memastikan keterpaduan sistem, data, dan layanan publik di seluruh level pemerintahan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 menegaskan komitmen kuat Diskominfo dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya melalui dua misi utama, yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, mudah, tepat waktu, dan terjangkau melalui transformasi digital pelayanan pemerintahan serta penguatan keterbukaan informasi publik; dan
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan ekosistem digital, integrasi data, serta peningkatan literasi dan keamanan informasi di masyarakat.

Dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan, pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat menghasilkan capaian-capaian strategis berikut:

- Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, melalui penerapan SPBE secara menyeluruh dan pengembangan konsep Smart Regency Lombok Tengah;
- Integrasi data dan sistem informasi daerah, melalui pelaksanaan kebijakan Satu Data Lombok Tengah yang sinkron dengan kebijakan nasional *Satu Data Indonesia*;
- Penguatan keamanan siber dan persandian daerah, melalui pembentukan, pengoperasian, dan pemantapan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Daerah; serta
- Peningkatan literasi dan budaya kerja digital bagi ASN dan masyarakat, untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif,

inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik digital yang inklusif.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menyadari bahwa penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029 ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dalam aspek data, metodologi, maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, diperlukan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan—baik unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, maupun masyarakat—agar pelaksanaan Renstra ini semakin efektif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat ke depan.

Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada:

- Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah beserta jajaran Pemerintah Daerah;
- Bapperida Kabupaten Lombok Tengah selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah atas dukungan data dan koordinasi statistik sektoral;
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atas arahan dan pembinaan teknis; dan
- Seluruh Perangkat Daerah, lembaga mitra, serta insan Diskominfo Lombok Tengah yang telah berperan aktif dalam penyusunan dan pengembangan arah kebijakan digital daerah.

Semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi panduan yang komprehensif, implementatif, dan

berorientasi hasil (*result-oriented*) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, transparan, dan inklusif, demi terwujudnya *Lombok Tengah Digital, Maju, dan Harmonis*.

